

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat-Nya alhamdulillah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017 dapat tersusun.

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam hal ini, setiap satuan organisasi/ kerja secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi atau kerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan melalui laporan Akuntabilitas kinerja ini, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman menuangkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2017.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman ini telah dilakukan Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014. Diharapkan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerja masing – masing bidang di masa yang akan datang, khususnya untuk tahun 2018 yang akan berjalan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, Januari 2017

Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten,

Ir. H. MOH. YANUAR, MP
NIP. 19610101 198802 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG	1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1-2
1.3 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA PERANGKAT DAERAH (OPD)	1-2
1.4 KEDUDUKAN	1-4
1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	1-4
1.6 TIPE DINAS	1-5
1.7 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	1-5
1.7.1 Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1-8
1.7.2 Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Jabatan UPT Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..	1-30
1.8 SUMBER DAYA MANUSIA	1-31
1.9 SISTEMATIKA PENULISAN	1-33

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	2-1
2.1.1 Rencana Strategis	2-1
2.1.2 Visi Dan Misi	2-1
2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2-3
2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2-4
2.1.5 Program Dan Kegiatan	2-7
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	2-10



2.3 PERJANJIAN KINERJA	2-13
------------------------------	------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 EVALUASI KINERJA	3-2
3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA.....	3-5
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama (IKU)	3-6
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Indikator Pendukung	3-50
3.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	3-65
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	3-82
3.4.1 Akuntabilitas Keuangan Sasaran/Program Strategi .	3-82
3.4.2 Realisasi Belanja	3-87
3.4.3 Sisa Anggaran (SILPA)	3-95

BAB IV PENUTUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	1-2
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	1-7
Gambar 1.3	Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan	1-32
Gambar 1.4	Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan	1-33
Gambar 3.1	Pembangunan MCK di Kp. Ciapu Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang	3-9
Gambar 3.2	Pembangunan MCK di Kp. Mekarsari Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang	3-9
Gambar 3.3	Pembangunan MCK di Kp. Cibusun RT 003 RW 004 Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang	3-10
Gambar 3.4	Pembangunan MCK di Kp. Kadubayun Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak	3-10
Gambar 3.5	Pembangunan MCK di Kp. Cibangkong Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak	3-10
Gambar 3.6	Pembangunan MCK di Kp. Ilham Jaya Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak	3-11
Gambar 3.7	Pembangunan MCK di Kp. Kadulisung Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak	3-11
Gambar 3.8	Pembangunan di MCK RT. 1 RW. 12 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang.....	3-11
Gambar 3.9	Pembangunan MCK di RT. 1 RW. 11 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang.....	3-12
Gambar 3.10	Pembangunan MCK di RT. 4 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang.....	3-12
Gambar 3.11	Pembangunan MCK di RT. 01 RW. 5 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang.....	3-12

Gambar 3.12 Pembangunan MCK di RT. 3 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang.....	3-13
Gambar 3.13 Pembangunan MCK di RT. 2 RW. 8 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang.....	3-13
Gambar 3.14 Pembangunan MCK di RT. 2 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang.....	3-13
Gambar 3.15 Pembangunan Drainase Jl. Cikujang - Cibakarang Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang.....	3-15
Gambar 3.16 Pembangunan Drainase Kp. Sinar Bakti Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-15
Gambar 3.17 Pembangunan Drainase Kp. Bojong Datar Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-15
Gambar 3.18 Pembangunan Drainase Kp. Mantiung Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-16
Gambar 3.19 Pembangunan Drainase Kp. Cibeurih RW. 001 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak.....	3-16
Gambar 3.20 Pembangunan Drainase Kp. Cibeurih Rw. 002 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak.....	3-16
Gambar 3.21 Pembangunan Drainase Kp. Cibeurih Rw. 003 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak.....	3-17
Gambar 3.22 Pembangunan Drainase RT. 2 RW. 12 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang	3-17
Gambar 3.23 Pembangunan Drainase RT. 1 RW. 11 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang	3-17
Gambar 3.24 Pembangunan Drainase RT. 3 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang	3-18
Gambar 3.25 Pembangunan Drainase RT. 2 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang	3-18
Gambar 3.26 Pembangunan TPS RT. 2 RW. 11 Desa Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang	3-18
Gambar 3.27 Pembangunan TPS RT. 1 RW. 11 Desa Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang	3-19
Gambar 3.28 Pembangunan TPS Kp. Pasirkaliki Rt. 3 Rw. 7 Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-19

Gambar 3.29 Pembangunan TPS Kp. Pasirkaliki Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang.....	3-19
Gambar 3.30 Pembangunan TPS Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak	3-20
Gambar 3.31 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikujang Dua Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-22
Gambar 3.32 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikujang Timur Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-22
Gambar 3.33 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikujang Barat Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-23
Gambar 3.34 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Pasir Kaliki Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-23
Gambar 3.35 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Leuwi Panjang Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-23
Gambar 3.36 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Sukamaneuh Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-24
Gambar 3.37 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikasungka Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-24
Gambar 3.38 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Mekarsari Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-24
Gambar 3.39 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikeusik Geblug Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-25
Gambar 3.40 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cibusun Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-25
Gambar 3.41 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	3-25
Gambar 3.42 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Ciapu Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang.....	3-26
Gambar 3.43 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cibeurih RW.01 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak	3-26
Gambar 3.44 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Ilhamjaya Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak	3-26
Gambar 3.45 Pembangunan Jalan Lingkungan di Gg. Swastika dan Gg. Peterpan Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	3-27

Gambar 3.46 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Pamarican Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	3-27
Gambar 3.47 Pembangunan Jalan Lingkungan di Lingk. Paud Ananda Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	3-27
Gambar 3.48 Pembangunan Jalan Lingkungan di Gg. Syuhada Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	3-28
Gambar 3.49 Pemeliharaan Atap Kanopi (Depan) Masjid Raya Al Bantani	3-32
Gambar 3.50 Pemeliharaan Pemeliharaan Atap Dan Kubah Mesjid Raya Al- Bantani	3-32
Gambar 3.51 Pemeliharaan Pagar Samping dan Belakang KP3B	3-33
Gambar 3.52 Pemeliharaan Instalasi dan Pemasangan Lampu Taman	3-33
Gambar 3.53 Landscape Gedung Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten	3-34
Gambar 3.54 Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II) ..	3-35
Gambar 3.55 Rehab Plaza Masjid	3-35
Gambar 3.56 Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap IV)	3-35
Gambar 3.57 Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten	3-39
Gambar 3.58 Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II).....	3-39
Gambar 3.59 Pembangunan Gedung Kantor dan Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II)	3-39
Gambar 3.60 Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II) ..	3-40
Gambar 3.61 Landscape Gedung Padepokan Silat	3-40
Gambar 3.62 Interior Ruang Kerja KEJATI Provinsi Banten.....	3-40
Gambar 3.63 Pembangunan RTLH di Desa Margaluyu, Kec. Sajira Kab. Lebak	3-46
Gambar 3.64 Pembangunan RTLH di Desa Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang.....	3-47
Gambar 3.65 Pengadaan Mobil Sapu Jalan (Road Sweeper) Kapasitas 4 M3 sebanyak 2 unit.....	3-57
Gambar 3.66 Pengadaan Truk Sampah Compactor Kap. 6,5 M3 dan 10 M3 Sebanyak 2 unit	3-58
Gambar 3.67 Pengadaan Truk Sampah Arm roll Sebanyak 2 unit	3-58
Gambar 3.68 Pengadaan Mobil Operasional Lapangan Pick Up sebanyak 1 unit.....	3-58

Gambar 3.69 Pengadaan Motor Roda Tiga Sampah pendukung TPST Kp3B Sebanyak 6 Unit	3-59
Gambar 3.70 Penataan TPST KP3B.....	3-59
Gambar 3.71 Revitalisasi Taman Jam.....	3-59
Gambar 3.72 Revitalisasi Taman Batu Fossil.....	3-60



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan	1-32
Tabel 1.2	Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang kepangkatan/Golongan	1-32
Tabel 2.1	Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tahun 2012-2017	2-5
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	2-11
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	2-14
Tabel 3.1	Predikat Nilai Capaian Kinerja	3-2
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja TA. 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	3-3
Tabel 3.3	Pencapaian Program/Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3-5
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Kinerja Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman	3-6
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi (M3)	3-7
Tabel 3.6	Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis Yang Tidak Terlaksana	3-8
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan Dan Pemukiman desa/ kel (lokasi)	3-19
Tabel 3.8	Pencapaian Indikator Kinerja Penyelesaian Gedung KP3B	3-30
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Gedung Kantor Sebanyak 15 Gedung	3-34
Tabel 3.10	Pencapaian Indikator Program Pembinaan Dan Penatan Perumahan	3-43
Tabel 3.11	Pencapaian Indikator Program Penyediaan Data Pembangunan	



Daerah	3-47
Tabel 3.12 Rekapitulasi paket/tolok ukur yang tidak dilaksanakan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	3-56
Tabel 3.13 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	3-65
Tabel 3.14 Realisasi Keuangan per Sasaran/Program Strategis	3-82
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Sasaran/Program Strategis	3-84
Tabel 3.16 Realisasi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	3-92
Tabel 3.17 Permasalahan Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	3-95
Tabel 3.18 Rekapitulasi Sisa Anggaran (SILPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	3-103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam LAKIP akan diuraikan mengenai history suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban menyusun LAKIP tahun 2017 selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, LAKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagai mana telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, capaian kinerja tahun unu, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.



Gambar 1.1 Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah perwujudan dari pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan khususnya di Provinsi Banten yang dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Banten.

Tujuan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Memberikan gambaran perihal kinerja Pemerintah Provinsi Banten Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017.
2. Memberikan Pertanggung Jawaban/Akuntabilitas terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan, khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

1.3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI KERJA PERANGKAT DAERAH (OPD)

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perangkat daerah provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Banten unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam upaya mendukung roda pemerintahannya, pemerintah Provinsi Banten telah membentuk dinas-dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah Banten No. 8 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten yang bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kab/ Kota dalam melayani masyarakat.

Dasar Hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan dinamika pembangunan semakin kompleks. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten menjadi tantangan yang harus dijawab melalui manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas menuju *good governance* mengikuti tahapan proses reformasi birokrasi. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional disertai

dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diupayakan, sehingga kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing daerah dapat diwujudkan.

1.4. KEDUDUKAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Banten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah.

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
2. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
3. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;
4. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
5. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
6. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
7. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
8. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
9. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;

10. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
11. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
12. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
14. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.6. TIPE DINAS

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diklasifikasi tipe B. Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan dengan beban kerja yang sedang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) sekretariat dengan 2(dua) sub bagian dan 3 (tiga) bidang yang masing- masing terdiri dari 3(tiga) seksi.

1.7. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan gubernur Provinsi Banten Nomor 83 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

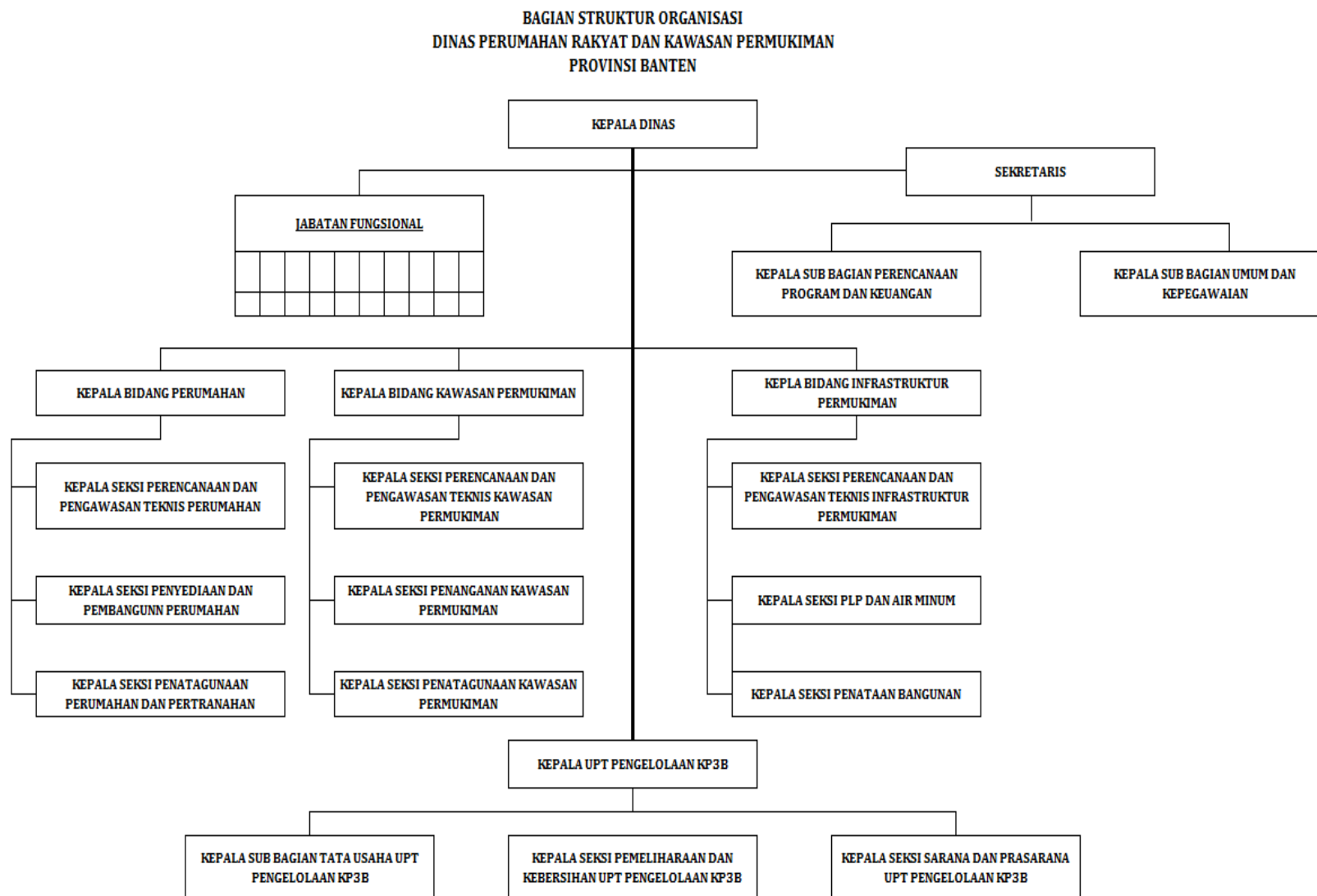
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - 2. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 2. Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
 - 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

1.7.1. Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a.** Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b.** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
- 6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
- 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
- 8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.2 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan

Keuangan.

- b.** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun APBN;
 - 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Perumahan

- a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, serta Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- 7) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang infrastruktur permukiman;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

- a.** Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.
- b.** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
 - 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
 - 8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;

- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.2 Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

- a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3.3 Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
- 6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan;
- 10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;

- 13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang infrastruktur permukiman;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Penanganan Kawasan Permukiman, serta Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanganan kawasan kumuh;
- 7) Merencanakan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 7) Menyiapkan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 8) Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog;
- 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 10) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.2 Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3 Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air Minum, serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

- b.** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
 - 6) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
 - 7) Merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;
 - 8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis program pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;

- 9) Merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 10) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

- sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknisbidang infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
 - 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
 - 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman;
 - 8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
 - 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
 - 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Seksi PLP dan Air Minum

- a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan,

koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi PLP dan air minum.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PLP dan Air Minum;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;
- 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota ;
- 7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;
- 10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.3 Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan lingkungan;
 - 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan tata bangunan dan lingkungan;

- 7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah Negara;
- 9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1.7.2. Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Jabatan UPT Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, tugas pokok dan fungsi UPT pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dengan mandiri.
3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan KP3B;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan KP3B;

- c. perumusan standar operasional prosedur pengelolaan KP3B;
 - d. pelaksanaan koordinasi kelompok jabatan fungsional;
 - e. pelaksanaan pendataan dan penginventarisasian kerusakan sarana dan prasarana serta utilitas yang ada di dalam KP3B;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan, sarana dan prasarana serta utilitas yang ada di dalam KP3B;
 - g. pelaksanaan pelayanan perizinan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana di dalam KP3B;
 - h. pelaksanaan pembinaan teknis dengan petugas pengelola gedung di masing-masing SKPD;
 - i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
 - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
4. Susunan Organisasi UPT Pengelola Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B, terdiri atas:
- a. Kepala UPT ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

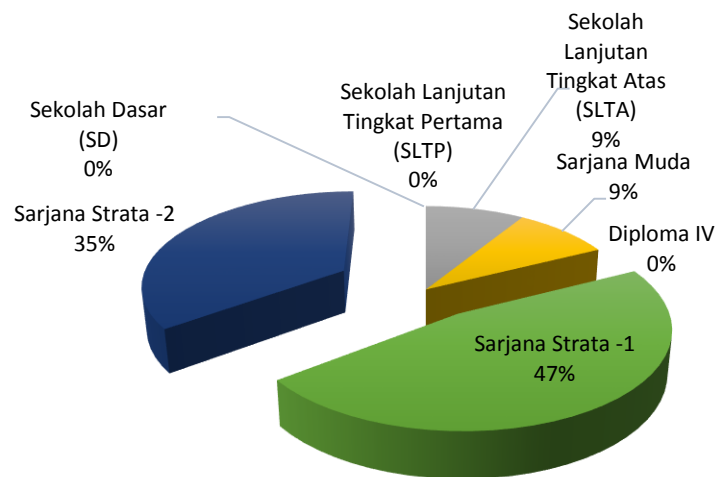
1.8. SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Sampai dengan Juni 2017, jumlah personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 68 Orang. Data pegawai (PNS) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Org)
Sekolah Dasar (SD)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6
Sarjana Muda	6
Diploma IV	0
Sarjana Strata -1	32
Sarjana Strata -2	24
JUMLAH	68 Orang

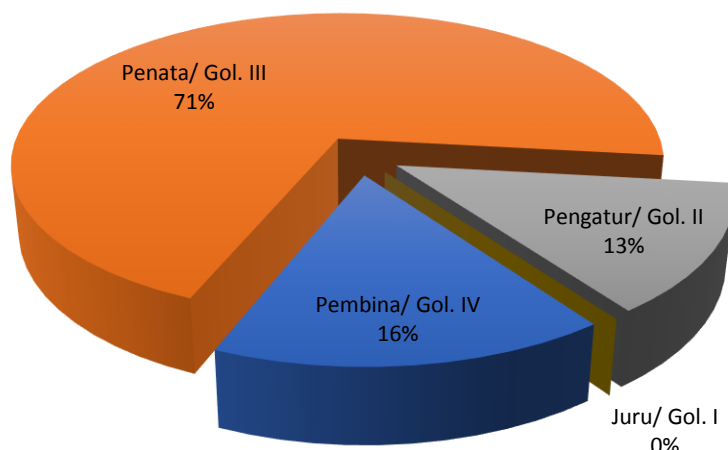


Gambar 1.3 Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sedangkan, apabila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang kepangkatan/Golongan.

Pangkat/ Golongan	Jumlah (Org)
Pembina/ Gol. IV	11
Penata/ Gol. III	48
Pengatur/ Gol. II	9
Juru/ Gol. I	0
JUMLAH	68 Orang



Gambar 1.4 Diagram Jumlah Personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Ini berisikan empat bab Utama yang terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten serta sistematika penulisan;

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II ini merupakan penjabaran rencana strategis, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja untuk Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III ini merupakan inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, dimana di dalamnya terdapat penjelasan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pekerjaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Rencana Strategis

Sebuah Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah (*mid-term planning*), yang terdiri atas visi, misi, analisis lingkungan internal dan eksternal, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh SKPD pada tahun ke-5 (lima) mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan tujuan SKPD dimasa yang akan datang.

Dalam periode 2012-2017, Visi Pembangunan Provinsi Banten adalah

“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Banten secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Banten lebih sejahtera.

2.1.2 Visi Dan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut melalui efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017.

Visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten masih mengacu pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Tahun 2012-2017. Visi tersebut yaitu :

**“Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan
Permukiman yang Andal untuk Mendukung Banten
Sejahtera”**

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2017, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Makna dari infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman yang andal merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang Sumber Daya Air dan permukiman yang penjabarannya meliputi:

1. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
2. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
3. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
4. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
5. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan
6. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman yang semakin luas, merata

dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Banten yang masih mengacu pada Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten tahun 2012 – 2017, yaitu:

- 1. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.**
- 2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.**
- 3. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.**

2.1.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahaun 2012-2017, antara lain:

1. Mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
2. Mengembangkan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
3. Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;
5. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;
6. Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana
7. Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;
8. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/ rumah Negara;
9. Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;
10. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
11. Menata regulasi manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya aparatur;
12. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengembangan pilihan layanan bergerak;
13. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD;
14. Menyediakan dan menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
15. Menyediakan data/ informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju data pembangunan Banten

2.1.4 Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kebijakan Umum sebagai rumusan dari strategi antara lain:

1. Tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui pengembangan Daerah irigasi (DI) dan rehabilitasi irigasi;
2. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik, dan industri, serta mendukung KEK Pariwisata Tanjung Lesung;
3. Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.
4. Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
5. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
6. Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.
7. Meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman

8. Terpenuhi kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
9. Terkendalnya proses alih status gedung/rumah negara
10. Meningkatnya kinerja aparatur
11. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian;
12. Mantapnya budaya aparatur yang profesional dan cerdas
13. Terpenuhi kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
14. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD;
15. Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Banten

Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sesuai dengan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sesuai dengan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman tahun 2012-2017

<i>VISI : Tersedianya Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Banten Sejahtera</i>			
<i>MISI I : Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air , bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk	Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;	1) Mengembangkan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;	Tersedianya jaringan irigasi yang handal, melalui pengembangan daerah irigasi (DI) dan rehabilitasi irigasi;
		2) Mengembangkan, Pengelolaan dan	Meningkatnya kondisi dan fungsi

adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim) untuk meningkatkan		Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;	sungai, waduk, situ, embung, dan sumber daya air lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, domestik, dan industri, serta mendukung KEK Pariwisata Tanjung Lesung;
		3) Meningkatkan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai;	Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang dapat mengendalikan banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai.

MISI II : Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur yang terpadu, andal dan berkelanjutan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal, perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman	1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air minum dan daerah tertinggal;	meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik
		2) Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan di perkotaan;	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman
		3) Meningkatkan infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di daerah tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan dan kawasan rawan bencana.

		dan kawasan rawan bencana;	
Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1) Mengembangkan Lingkungan Permukiman Sehat;	meningkatnya pemberdayaan komunitas permukiman Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni melalui fasilitasi pembangunan hunian vertikal (rusun), pengembangan kasiba/lisiba, penataan kawasan kumuh, serta fasilitasi dan koordinasi pengembangan perumahan dan permukiman.
	Terwujudnya keamanan dan keserasian dalam pembangunan infrastruktur	1) Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara;	terkendalinya proses alih status gedung/rumah negara
MISI III : Menyelenggarakan tata laksana pemerintahan yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik	Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi	1) Meningkatkan kinerja, disiplin dan profesionalitas aparatur daerah;	Meningkatnya kinerja aparatur;

2.1.5 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Renstra Dinas

Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten periode Tahun 2012-2017 berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan Umum, Otonomi dan Administrasi Keuangan

- a. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, indikator kinerja programnya adalah:
 - 1) Indikator Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B
 - 2) Indikator Rasio Pembangunan, Penggandaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B
 - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B
 - 3) Indikator Rasio Pembinaan dan Peningkatan pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - 4) Indikator Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah:
 - Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.
- b. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, indikator kinerja programnya adalah:
 - 1) Indikator Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan dan Aset SKPD
 - 2) Indikator Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Statistik

- a. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, indikator kinerja programnya adalah:
 - 1) Indikator Rasio Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi

3. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman, indikator kinerja programnya adalah:
 - 1) Indikator Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
 - Kegiatan Pembangunan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
 - 2) Rasio Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
 - Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman
 - Kegiatan Penatagunaan Kawasan Permukiman
 - 3) Indikator Rasio Penyelesaian Gedung KP3B, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
 - Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
 - Kegiatan Pembangunan Gedung kantor KP3B (Pembayaran Kewajiban TA. 2016)
 - 4) Rasio Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - Kegiatan Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciaptakarya Lainnya
 - Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman

- Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
- Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Pembayaran Kewajiban TA. 2016).

4. Bidang Perumahan

a. Program Pembinaan dan Penataan Perumahan, indikator kinerja programnya adalah:

- 1) Indikator Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan, kegiatannya adalah:
 - Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
 - Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan
 - Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan
 - Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan strategis yang disusun oleh SKPD dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis., yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Turunan dari rencana strategis dan rencana kinerja adalah penetapan kinerja yang merefleksikan kinerja yang sesuai perencanaan anggaran. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerjanya berdasarkan sasaran/ kegiatan, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Hasil dari proses ini berupa Rencana kinerja Tahunan (RKT) seperti dijelaskan dibawah ini :

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%
		Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100 %
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	100%
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	100%

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	1.983,75 m3
		Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	1.983,75 m3
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman desa/kel (lokasi)	113
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman desa/kel (lokasi)	113
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman desa/kel (lokasi)	113
		Penyelesaian Gedung KP3B	1
		Penyelesaian Gedung KP3B	1
		Penyelesaian Gedung KP3B	
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3
4	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%
			20%
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tetapi melalui Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden republik indonesia mengintruksikan tentang penyusunan penetapan kinerja kepada Menteri, Jaksa agung, Panglima TNI, Kepala polri, Kepala LPND, Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana tercantum pada butir ketiga inpres tersebut, yaitu sebagai berikut : membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.

Penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	165,990,000
			2 dokumen	1 .	Penyusunan Buku/Himpunan SPP,SPM dan Sp2D Semeสเตอร์ Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Prov.Banten	
			2 dokumen	2 .	Konsultasi Sistem Gaji Taspen dengan Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman	
			2 dokumen	3 .	Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan Pengembalian Belanja Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman	
			2 dokumen	4 .	Penyusunan Data Prognosis TA.2017 Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Prov.Banten	
			2 dokumen	5 .	Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Ta.2017	
			2 dokumen	6 .	Rekonsiliasi Data Aset APBD TA.2017	
			2 dokumen	7 .	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Provinsi Banten	
			2 dokumen	8 .	Pelaporan Pengelolaan Arsip Dinas PKP Prov.Banten	
			1 dokumen	9 .	Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan Dinas PKP	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1 dokumen	10 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
			2 dokumen	11 .	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	
			100%	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,100,908,100
			1 Dokumen	1 .	Penyusunan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2016	
			1 Dokumen	2 .	Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2016	
			1 Dokumen	3 .	Penyusunan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2016	
			1 Dokumen	4 .	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	
			12 Laporan Bulanan	5 .	Penyusunan Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan APBD dan APBN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	
			1 Laporan	6 .	Forum Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017- 2023	
			1 Dokumen	7 .	Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FSKPD) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
					Permukiman se- Provinsi Banten Tahun 2017	
			2 Dokumen	8 .	Penyusunan RKA-P /DPPA APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	
			2 Dokumen	9 .	Penyusunan RKA /DPA APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2018	
			1 Laporan	10 .	Monitoring Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber Dana APBD TA. 2017	
			1 Laporan	11 .	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Pelaksanaan Pembangunan TA. 2017 dan Pedoman Penyusunan RKA TA. 2018	
			1 Laporan	12 .	Workshop Penyusunan DRPK Tahun 2018	
			3 Dokumen	13 .	Penyusunan Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018	
			1 Dokumen	14 .	Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa (RUP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2017	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			4 Laporan	15 .	Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber Dana APBD Provinsi Banten TA. 2017	
			1 Laporan	16 .	Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2018	
			4 Laporan	17 .	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	
			1 Laporan	18 .	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017	
			1 Dokumen	19 .	Penyusunan Peraturan Gubernur Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017	
			1 Dokumen	20 .	Penyusunan Updating Katalog Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2008- 2017	
			1 Dokumen	21 .	Penyusunan Rencana kerja Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan	
			1 Laporan	22 .	Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Laporan	23 .	Sosialisasi Penyelenggaraan Hibah/Bansos Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	
			1 Laporan	24 .	Rapat Koordinasi Keterpaduan Penyelenggaraan Program dan Anggaran Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	
			1 Laporan	25 .	Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak/ E- Kontrak\	
			1 Dokumen	26 .	Penyusunan Data Base Kajian Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017	
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3,125,100,000
			5 Unit	1 .	Pengadaan GPS	
			5 Unit	2 .	Pengadaan Peralatan Studio Visual	
			20 Unit	3 .	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	
			20 Unit	4 .	Pengadaan Personal Komputer	
			14 Unit	5 .	Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	
			20 Unit	6 .	Pengadaan Meja Kerja	
			20 Unit	7 .	Pengadaan Kursi Kerja	
			1 Dokumen	8 .	Penyusunan RKBMD Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PKP TA. 2018	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			5 Laporan	9 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PKP TA. 2017	
			1 Tahun	10 .	Sewa Tempat Penyimpanan Barang Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	
			1 Paket	11 .	Penataan Ruang Kepala Dinas	
			1 Paket	12 .	Peningkatan Ruang Sekretaris Dinas	
			1 Paket	13 .	Kelengkapan Ruang Kepala Dinas	
			1 Paket	14 .	Pengadaan Barang Jasa Vertikal Blind	
			1 Paket	15 .	Pengadaan Barang Jasa Kaca Film	
			1 Paket	16 .	Pengadaan Barang Jasa Peralatan Komputer; Pengadaan Barang Jasa Jaringan Server Internet	
			6 Unit	17 .	Pengadaan Mesin Pel; Mesin Genset	
			41 Unit	18 .	Pengadaan Projector, Infocus Projector(120 inchi), Televisi LCD, Printer Scanner A3,Pesawat Telepon	
			26 Unit	19 .	Pengadaan Printer A3 Warna, Printer Laserjet A3, Printer Epson L. 120	
			15 Unit	20 .	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas, Mesin Fotocopy	
			1 Unit	21 .	Pengadaan Mesin PABx	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			100%	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	93,233,045,127
			1 Unit Genset Gedung SKPD Terpadu kapasitas 1000 KVA	1 .	Pengadaan Genset Gedung SKPD Terpadu	
			1 Kegiatan Instalasi Genset Gedung SKPD Terpadu kapasitas 1000 KVA	2 .	Instalasi Genset Gedung SKPD Terpadu	
			1 Unit Tangki Solar Genset 5000 L Gedung SKPD Terpadu kapasitas 1000 KVA	3 .	Pengadaan Tangki Solar Genset Gedung SKPD Terpadu	
			5.000 Pengadaan BBM Solar Genset	4 .	Pengadaan BBM Solar Genset	
			1 Paket Pekerjaan Penataan TPST KP3B	5 .	Pekerjaan Penataan TPST KP3B	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Paket Alat Pendukung Pengolahan Sampah TPST KP3B	6 .	Pengadaan Alat Pendukung Pengolahan Sampah TPST KP3B	
			1 Paket Penambahan Daya Listrik PLN/Tambah Daya 4.400 Watt + Penambahan 5 Titik Stop Kontak	7 .	Biaya Penambahan Daya Listrik PLN/Tambah Daya Pendukung TPST KP3B	
			100 Meter Kabel Supply Gedung SKPD Terpadu	8 .	Penambahan Kabel Supply Gedung SKPD Terpadu	
			3 Unit Motor Roda Tiga Dump Hidrolik 150 CC panjang Bak 160 cm, Steel Plate, Dump Hidrolik Otomatis	9 .	Pengadaan Motor Roda Tiga Sampah Dump Hidrolik Pendukung TPST KP3B	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			3 Unit Motor Roda Tiga 150 cc Panjang Bak 160 cm Steel Plate, bak modifikasi	10 .	Pengadaan Motor Roda Tiga Sampah Pendukung TPST KP3B	
			3 unit Motor Operasional Lapangan KP3B 150 cc Automatic	11 .	Pengadaan Motor Operasional Lapangan KP3B	
			2 Unit Mobil Alat Angkut Sampah Dump Truck 6,5 m3	12 .	Pengadaan Mobil Alat Angkut Sampah Arm Roll + Kontainer Tertutup Pendukung TPST KP3B	
			1 Unit Mobil Operasional Lapangan PickUp 1.500 cc, Power Steering, AC , Audio	13 .	Pengadaan Mobil Operasional Lapangan PickUp	
			6 Unit Alat Mesin Pemotong Rumput Gendong	14 .	Pengadaan Alat Mesin Pemotong Rumput Gendong	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			2 Unit Alat Mesin Gergaji Kayu Chainsaw 18 inch 45 cm	15 .	Pengadaan Alat Mesin Gergaji Kayu	
			1 Unit Drone Camera + accessories	16 .	Pengadaan Drone Camera + accessories	
			2 Unit Alat Ukur Meteran Dorong Digital Measuring Wheel	17 .	Pengadaan Alat Ukur Meteran Dorong Digital Measuring Wheel	
			1 Unit Alat Pemetaan GPS Camera	18 .	Pengadaan Alat Pemetaan GPS Camera	
			2 Unit Pompa Sedot Air output 3 inch	19 .	Pengadaan Pompa Sedot Air	
			1 Kegiatan Pembuatan Canopy Parkir Gedung SKPD Terpadu	20 .	Pembuatan Canopy Parkir Gedung SKPD Terpadu	
			1 Kegiatan Revitalisasi Taman Jam	21 .	Revitalisasi Taman Jam	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Kegiatan Revitalisasi Taman Batu Fossil	22 .	Revitalisasi Taman Batu Fossil	
			1 Unit Garbage Truck Compactor Kap. 6,5 m3	23 .	Pengadaan Garbage Truck Compactor Kap. 6,5 m3	
			1 Unit Garbage Truck Compactor Kap. 10 m3	24 .	Pengadaan Garbage Truck Compactor Kap. 10 m3	
			1 Kegiatan Instalasi CCTV SKPD Terpadu	25 .	Instalasi CCTV + accessories SKPD Terpadu	
			50 Unit Tempat Sampah Tutup Roda Dorong 240 L	26 .	Pengadaan Tempat Sampah Tutup Roda Dorong	
			1 Kegiatan DED Workshop UPT KP3B	27 .	DED Workshop UPT KP3B	
			1 Lumpsum Kegiatan Konsultan Survey Inventarisasi Kebutuhan Sarana Prasaranan KP3B	28 .	Konsultan Individu Survey Inventarisasi Kebutuhan Sarana Prasaranan KP3B	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			2 unit Mobil Sapu Jalan	29 .	Pengadaan Mobil Sapu Jalan	
			1.000 Meter Persegi Lahan Masjid Kecil KP3B	30 .	Pembebasan Lahan Masjid Kecil KP3B	
			1 Paket Konsultan Appraisal Pengembangan lahan KP3B	31 .	Konsultan Appraisal Pengembangan Lahan KP3B	
			30 Unit Alat pemadam Api Ringan (APART) 5Kg	32 .	Pengadaan Alat pemadam Api Ringan (APART) SKPD Terpadu	
			1 Unit Alat Dokumentasi Lapangan Camera DSLR 24.1 MP - 18-140mm VR - Lens Kit	33 .	Pengadaan Alat Dokumentasi Lapangan Camera DSLR	
			14.390 meter persegi Pembebasan Lahan KP3B	34 .	Pembebasan Lahan KP3B	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			10 Orang Bulanan Konsultan Individu Pengawasan Pekerjaan 5 Kegiatan Fisik Sarana Prasarana KP3B	35 .	Konsultan Pengawasan Pekerjaan 5 Kegiatan Sarana Prasaranana KP3B	
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,750,000,000
			39 unit	1 .	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3	
			19 unit	2 .	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	
			9 unit	3 .	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	
			67 unit	4 .	Pemeliharaan Peralatan Kantor	
			85 unit	5 .	Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer	
			8 unit	6 .	Pemeliharaan Infocus	
			129 buah	7 .	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	
			1 Unit.	8 .	Pemeliharaan Alat Komunikasi	
			1 Tahun	9 .	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat kerja	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	29,000,000
			1 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B	1 .	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B	
			1 Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B	2 .	Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B	
			5 Laporan	3 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
		Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	471,000,000
			1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	
			1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola KP3B	2 .	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola KP3B	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			5 Laporan	3 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	8	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,917,644,625
			1 tahun	1 .	Penyedia Barang dan Jasa Perkantoran	
			48 kali	2 .	Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan Pada Media massa	
			1 kegiatan	3 .	Pameran Display Banten Expo pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			1 kegiatan	4 .	Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum	
			1 kegiatan	5 .	Inventarisasi Barang Milik Negara	
			1 Kegiatan	6 .	Outsourcing Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa	100%	9	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	500,000,000



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	1 Kegiatan Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	1 .	Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	
			1 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Pengelolaan KP3B	2 .	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Pengelolaan KP3B	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B	3 .	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B	
			5 Laporan	4 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	100%	10	Peningkatan Kapasitas Aparatur	429,997,200
			25 Orang	1 .	Bimbingan teknis kearsipan	
			200 Orang	2 .	Workshop Pembangunan dalam Media	
			20 Orang	3 .	Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			25 Orang	4 .	Bimbingan penyusunan SOP dan SP	
			80 Orang	5 .	Pembinaan Kepegawaian Aparatur Dinas	
			120 Orang	6 .	Pembinaan Kepegawaian Non PNS pada Dinas	
			14 Orang	7 .	Pengiriman Diklat Teknis/ Kursus Singkat/ Pelatihan*) pada Aparatur Dinas	
		Rasio Penyelenggaraan	100%	11	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	3,100,000,000



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	12 Bulan	1 .	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	
			12 Bulan	2 .	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	
3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	1.983,75 m3	12	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	9,687,146,800
			3 Dokumen Lap Triwulan dan 1 Lap. Akhir Kegiatan Dokumen	1 .	AP dan Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
			1 Kegiatan	2 .	Penyusunan Data Base Air Minum	
			1 Kegiatan	3 .	Peningkatan Bangunan Instalasi Air Bersih I KP3B	
			10 Paket	4 .	Penyediaan Air Bersih pada Kawasan Banten Lama	
			47 Paket	5 .	Penyediaan Air Bersih Pada kawasan Strategis	
			3 Kegiatan	6 .	Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Bersih 1, 2, 3, 4 KP3B	
			1 Kegiatan	7 .	Sosialisasi Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di kawasan Banten Lama	
			1 Kegiatan	8 .	Sosialisasi Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Desa Margaluyu dan Desa Tanjungan	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	1.983,75 m3	13	Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	7,006,817,750
			3 Kegiatan	1 .	Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 2 KP3B	
			3 Kegiatan	2 .	Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 3 KP3B	
			3 Dokumen Lap. Triwulan dan 1 Lap. Akhir Kegiatan	3 .	AP dan Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
			1 kegiatan	4 .	Pembangunan Kolam Retardasi/Retensi dan Bangunan Pelengkap KP3B Lainnya	
			1 kegiatan	5 .	Penyusunan Data Base Sanitasi	
			7 kegiatan	6 .	Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan Pada Kawasan Strategis	
			3 kegiatan	7 .	Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 1 KP3B	
			7 paket	8 .	Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan Pada Kawasan Banten Lama	
			1 Kegiatan	9 .	Sosialisasi Pekerjaan Pembangunan Drainase Lingkungan	
			6 Paket	10 .	Pembangunan Tempat Sampah	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	113	113	14	Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan	11,832,670,000
			70 Orang	1 .	Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan	
			31 Lokasi	2 .	Pembangunan Perdesaan Kelurahan Terpadu Berbasis Kantong-kantong Kemiskinan Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang	
			14 Lokasi	3 .	Pembangunan Perdesaan Kelurahan Terpadu Berbasis Kantong-kantong Kemiskinan Dea Margaluyu Kec. Sajira, Desa Cimarga Kec. Cimarga, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga, Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga, Desa Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak	
			8 Lokasi	4 .	Pembangunan Perdesaan Kelurahan Terpadu Berbasis Kantong-kantong Kemiskinan Kel. Margaluyu Kec. Kasemen, Kel. Warung jaud Kec. Kasemen Kota Serang	
			18 Lokasi	5 .	Peningkatan Kualitas Prasarana Lingkungan Banten Lama	
	Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	113	113	15	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	3,672,291,500
			1 Kota	1 .	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Serang	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Kabupaten	2 .	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Serang	
			1 Kabupaten	3 .	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Lebak	
			1 Kabupaten	4 .	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Pandeglang	
			1 Kota	5 .	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Tangerang	
			1 Kota	6 .	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Tangerang Selatan	
			1 Kabupaten	7 .	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Tangerang	
			1 Kota	8 .	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Cilegon	
			1 Kabupaten & 2 Kota	9 .	Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Di WKP I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan)	
			1 Kabupaten & 2 Kota	10 .	Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Di WKP II (Kab. Kota Serang dan Kota Cilegon)	
			2 Kabupaten	11 .	Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Di WKP III (Kab. Lebak dan Pandeglang)	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Laporan	12 .	Konsultan Pengawas Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) Provinsi Banten	
			8 Kabupaten/Kota	13 .	Rapat Koordinasi Kegiatan DED Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di 8 Kab./Kota	
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman desa/kel (lokasi)	113	16	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1,177,148,000
			1 Dokumen Pedoman Teknis Penanganan Kawasan kumuh dan Bencana Tahun 2018 Dokumen	1 .	Penyusunan Pedoman Teknis Penanganan Kawasan kumuh dan Bencana	
			1 Dokumen SOP Penanganan Kawasan Kumuh dan Bencana Tahun 2018 Dokumen	2 .	Penyusunan SOP Penanganan Kawasan Kumuh dan Bencana	
			3 Kegiatan Kegiatan	3 .	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah provinsi Bidang Kawasan Permukiman Kumuh dan Bencana 8 kab/kota	
			1 Dokumen	4 .	Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		Penyelesaian Gedung KP3B	1	17	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten	7,644,859,375
			1 Kegiatan Landscape di Luar Pagar Batas SKPD (Pembersihan Jalan, Rumput Media Jalan, Taman Bunderan, Kolam Retensi, Taman Pancaniti, Taman Kavling F.21 dan F.4, Taman Gerbang Depan, Taman Plaza Aspirasi, Taman SKPD Terpadu)	1 .	Pemeliharaan Kebersihan KP3B	
			1 Kegiatan Perawatan Dinding ACP dan Kaca Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	2 .	Perawatan Dinding ACP dan Kaca Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Kegiatan Perawatan Utilitas Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	3 .	Perawatan Utilitas Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	
			1 Kegiatan Pemeliharaan Infrastruktur KP3B	4 .	Rekening Listrik KP3B (Alun-alun KP3B, Landscape Monumen KP3B, Monumen Kayu Fosil KP3B, SKPD Terpadu)	
			5 Laporan	5 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
			1 Dokumen	6 .	Updating Master Plan KP3B	
			1 Kegiatan Perawatan Lift Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	7 .	Perawatan Lift Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	
			1 Kegiatan Perawatan Elektrikal Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	8 .	Perawatan Elektrikal Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Kegiatan Pemeliharaan Atap dan Kubah Mesjid Raya Al-bantani	9 .	Pemeliharaan Atap dan Kubah Mesjid Raya Al-bantani	
			1 Kegiatan Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Laki-laki (Depan) Mesjid Raya Al-bantani	10 .	Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Laki-laki (Depan) Mesjid Raya Al-bantani	
			1 Kegiatan Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Laki-laki (Belakang) Mesjid Raya Al-bantani	11 .	Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Laki-laki (Belakang) Mesjid Raya Al-bantani	
			1 Kegiatan Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Perempuan Mesjid Raya Al-bantani	12 .	Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Perempuan Mesjid Raya Al-bantani	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Kegiatan Pemeliharaan Atap Kanopi (Depan) Mesjid Raya Al-bantani	13 .	Pemeliharaan Atap Kanopi (Depan) Mesjid Raya Al-bantani	
			1 Kegiatan Pemeliharaan Atap Kanopi (Belakang) Mesjid Raya Al-bantani	14 .	Pemeliharaan Atap Kanopi (Belakang) Mesjid Raya Al-bantani	
			1 Kegiatan Perbaikan Pagar Depan dan Pengecatan Gapura KP3B	15 .	Perbaikan Pagar Depan dan Pengecatan Gapura KP3B	
			1 Kegiatan Perbaikan dan Pengecatan Pos Pengamanan dan Halte di KP3B	16 .	Perbaikan dan Pengecatan Pos Pengamanan dan Halte di KP3B	
			1 Kegiatan Perbaikan (Patching) Jalan di KP3B	17 .	Perbaikan (Patching) Jalan di KP3B	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		Penyelesaian Gedung KP3B	1	18	Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	13,608,341,180
			1 Landscape Gedung		1 . Landscape Gedung Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten	
			1 Gedung		2 . Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II)	
			1 Gedung		3 . Rehab Plaza Masjid	
			1 Dokumen untuk masa manfaat 1 (satu) tahun		4 . Data Base Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	
			5 Laporan		5 . Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
			1 Dokumen Renja Seksi Tata Bangunan TA. 2018		6 . Penyusunan Rencana Kerja Seksi Tata Bangunan	
			1 Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Kabel Listrik NYFGbY Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten		7 . Pengadaan dan Pemasangan Kabel Listrik NYFGbY Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	
			1 Gedung		8 . Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap IV)	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		Penyelesaian Gedung KP3B		19	Pembangunan Gedung kantor KP3B (Pembayaran Kewajiban TA. 2016)	984,272,153
			1 Gedung	1 .	Penambahan Ruang Dinas SDA & Pemukiman Provinsi Banten (tahap III)	
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	20	Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	47,665,745,668
			1 Landscape Gedung	1 .	Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten	
			1 Gedung	2 .	Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II)	
			1 Gedung	3 .	Pembangunan Gedung Kantor dan Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II)	
			1 Gedung	4 .	Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II)	
			1 Landscape Gedung	5 .	Landscape Gedung Padepokan Silat	
			1 Kegiatan	6 .	Bimbingan Teknis PP Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	
			1 Dokumen untuk masa 1 Tahun	7 .	Data Base Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Di Luar KP3B	
			5 Laporan	8 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Dokumen Renja Seksi Tata Bangunan TA. 2018	9 .	Penyusunan Rencana Kerja seksi Tata Bangunan	
			4 Gedung	10 .	Pembayaran Listrik Gedung Kantor Tahun 2016 di Luar KP3B	
			1 Dokumen Pergub	11 .	Penyusunan Pergub Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Teknis dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di lingkup OPD Provinsi Banten dan Instansi Vertikal	
			1 Dokumen	12 .	Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	
			1 Gedung	13 .	Interior Ruang Kerja	
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	21	Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciaptakaryaan Lainnya	3,664,419,400
			1 Dokumen DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kec. Bayah Kabupaten Lebak	1 .	DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kec. Bayah Kabupaten Lebak	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Dokumen DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karyaan di Kec. Maja Kab. Lebak	2 .	DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karyaan di Kec. Maja Kab. Lebak	
			1 Dokumen DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karyaan di Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	3 .	DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karyaan di Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Dokumen SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kwsn. Strategis ekonomi Kec. Bojonegoro di Kab. Serang	4 .	SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kwsn. Strategis ekonomi Kec. Bojonegoro di Kab. Serang	
			1 Dokumen SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kecamatan Kasemen Kota Serang	5 .	SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kecamatan Kasemen Kota Serang	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Dokumen Perencanaan Penyediaan Air Bersih dan Perluasan Area Seren Taun pada Kawasan Kaolotan	6 .	Perencanaan Penyediaan Air Bersih dan Perluasan Area Seren Taun pada Kawasan Kaolotan	
			1 Dokumen Kompilasi Data Perencanaan Bangunan Gedung	7 .	Kompilasi Data Perencanaan Bangunan Gedung	
			4 Dokumen Laporan Triwulan dan 1 Dokumen Laporan Tahunan	8 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	
			1 Dokumen SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karyaan di Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang	9 .	SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karyaan di Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Dokumen Review Masterplan Pembangunan TPST Bojong Menteng	10 .	Review Masterplan Pembangunan TPST Bojong Menteng	
			1 Dokumen Studi Kelayakan Lokasi Rumah Jabatan Pimpinan Daerah	11 .	Studi Kelayakan Lokasi Rumah Jabatan Pimpinan Daerah	
			1 Dokumen Studi Kebutuhan Anggaran Penataan Banten Lama	12 .	Studi Kebutuhan Anggaran Penataan Banten Lama	
			1 Dokumen Kajian Penetapan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	13 .	Kajian Penetapan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			2 Dokumen Kompilasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Permukiman	14 .	Kompilasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Permukiman	
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	22	Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	2,231,250,000
			3 Dokumen Pengawasan	1 .	Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	
			2 Dokumen Pengawasan	2 .	Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	
			4 Dokumen Pengawasan	3 .	Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	
			5 Dokumen Pengawasan	4 .	Pengawasan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	
			5 Dokumen Laporan	5 .	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	
			11 Dokumen Laporan	6 .	Rapat Koordinasi Evaluasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	
		Pembangunan Gedung Kantor	3	23	Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	1,195,085,500



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
		sebanyak 15 gedung	1 (satu) Dokumen	1 .	Jakstra dan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah dan Sanitasi Provinsi Banten	
			1 (satu) Dokumen	2 .	Jakstra dan Rencana Induk Pengembangan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Provinsi Banten	
			4 Laporan Triwulan	3 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	24	Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Pembayaran Kewajiban TA. 2016)	4,512,466,260
			1 Gedung	1 .	Pembanguann Gedung Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Banten, PUSDALOPS dan Kelengkapan Operasional Lainnya (Tahap II)	
			1 Gedung	2 .	Pembangunan Asrama BLKI (tahap I)	
4	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%	25	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	1,799,255,000
			1 Dokumen dan 1 Peraturan Gubernur	1 .	Penyusunan Program Pengembangan Perumahan	
			1 Dokumen	2 .	Pendataan Kajian Calon Hunian	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Dokumen	3 .	SID Pengembangan prototype type rumah hunian horizontal dan vertical	
			5 Dokumen	4 .	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	
			1 Dokumen	5 .	Pengawasan Pembangunan RTLH TA. 2017	
			1 Dokumen	6 .	Pengawasan RTLH pada Kawasan Strategis Banten Lama	
			1 Dokumen	7 .	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan RTLH	
			1 Dokumen	8 .	Penyusunan Laporan capaian SPM Bidang Perumahan	
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%	26	Pembinaan dan Penataan Perumahan	4,916,151,000
			97 Orang	1 .	Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	
			1 Dokumen	2 .	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan (Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Kegiatan dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun)	
			86 rumah	3 .	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak	
			97 Rumah	4 .	Koordinasi Stimulan Pembangunan Rumah	
			97 Orang	5 .	Evaluasi Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			9 Rumah	6 .	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang	
			30 Orang	7 .	Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak layak Huni Kota Serang	
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%	27	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	2,700,000,000
			4 Dokumen Data Numerik dan Spasial	1 .	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	
			8 Dokumen Sosialisasi	2 .	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Bidang Perumahan 8 Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten	
			1 Hasil Laporan (Prosiding)	3 .	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan	
			1 Dokumen Raperda	4 .	Penyusunan Naskah Akademis RAPERDA Pembiayaan Perumahan	
			1 Dokumen	5 .	Sinergitas Program Pengembangan dan Pembangunan Perumahan	
			1 Dokumen Raperda	6 .	Penyusunan Naskah Akademis RAPERDA Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%	28	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	950,000,000
			1 Kegiatan	1 .	Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	
			1 Kegiatan	2 .	Koordinasi Penyediaan Pembangunan Perumahan	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Kegiatan	3 .	Penyelenggaraan PSU Permukiman	
			20%	29	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	22,400,000,000
			1 Dokumen Perencanaan	1 .	Perencanaan Pengadaaan Lahan	
			5 Dokumen Laporan	2 .	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Penyelenggaran Perencanan Pengadaan Lahan	
			1 Lokasi	3 .	Persiapan Pengadaan Lahan	
			4,6 Ha	4 .	Pengadaan Lahan Banten Lama	
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket	30	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	525,000,000
			1 Dokumen Laporan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 .	Penyediaan Data Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			1 Unit Sarana Jaringan dan Biaya Akses Selama 12 Bulan	2 .	Pemeliharaan Jaringan Komputer Dan Sistem Telematika Data Base Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			1 Dokumen Laporan dan Buku Data dan Informasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	3 .	Update Buku Data dan Informasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017	
			1 Dokumen Laporan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	4 .	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			1 Dokumen Laporan Publikasi Informasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan	5 .	Publikasi Informasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	



No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan dan Tolok Ukur			Pagu Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
			Permukiman Provinsi Banten				
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2017							256,995,604,638

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hokum atau pimpinan kolektif secara transpara mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dan masing – masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2012 – 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan sasarn yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2014 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	= 100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. EVALUASI KINERJA

Sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian – capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Selain capaian kinerja dari penetapan kinerja, dalam bab ini juga diuraikan capaian kinerja anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pada tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menetapkan lima rencana strategis yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Kelima rencana strategis tersebut meliputi :

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3. Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman
4. Pembinaan dan Penataan Perumahan
5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Ketercapaian kinerja rencana strategis tersebut di atas dapat dilihat dari keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang akan dicapainya. Pengukuran kinerja per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja TA. 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian/ Ketidaktercapaian / Pelampauan Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	100%	Tercapai
		Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%	Tercapai
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	22.55%	22.55%	Tidak tercapai karena terdapat pengadaan Lahan KP3B sebesar 14,390 m2 tidak terlaksana dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (dianggarkan pada APBD-P)
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	100.00%	Tercapai
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	100%	77.41%	77.41%	

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian / Ketidaktercapaian / Pelampauan Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100.00%	Tercapai
3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	1.983,75 m3	734,4 m3	37,02 %	Tidak tercapai karena terjadi pengurangan anggaran pada APBD- P sebesar 21,8 Milyar (jumlah paket berkurang dari 255 paket menjadi 56 paket) disebabkan administrasi kelengkapan belanja hibah untuk paket tersebut tidak memenuhi persyaratan
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman desa/kel (lokasi)	113	71	62,83 %	Tidak tercapai karena terjadi pengurangan anggaran pada APBD- P sebesar 43,1 Milyar (jumlah paket berkurang dari 125 paket menjadi 71 paket) disebabkan administrasi kelengkapan belanja hibah untuk paket tersebut tidak memenuhi persyaratan
		Penyelesaian Gedung KP3B	1	1	100 %	Tercapai
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	3	100 %	Tercapai
4	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%	6.40%	32%	Tidak tercapai dikarenakan ada 1 kegiatan pengadaan lahan tidak terlaksana dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (dianggarkan pada APBD-P)
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket	1	100 %	Tercapai

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki 5 (lima) program/sasaran strategis yang akan dicapai melalui 12 (dua belas) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Terhadap 5 (lima) program/sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.3 Pencapaian Program/Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Ketercapaian Target	Keterangan
1	Program Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Daerah	2	100 %	
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	4	74.99 %	
3	Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	4	74.96 %	
4	Program Pembinaan dan Penataan Perumahan	1	32 %	
5	Program Penyediaan dan Pembangunan Daerah	1	100 %	

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari kelima sasaran strategis tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi **indikator kinerja utama** yaitu **Program Pengembangan Dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman, Pembinaan dan Penataan Perumahan dan Penyediaan Data Pembangunan Daerah**, dimana rincian dan analisis terhadap capaian sasaran strategis tersebut beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman

Pencapaian Indikator Kinerja Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian (%)	
1	Program Pengembangan, dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman	1	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m³)	1983.75	M³	734.4	M³	37.02	%
		2	Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman desa/kel (lokasi)	113	Lokasi	71	Lokasi	62.83	%
		3	Penyelesaian Gedung KP3B	1	Gedung	1	Gedung	100	%
		4	Pembangunan gedung kantor sebanyak 15 gedung	3	Gedung	3	Gedung	100	%
	Rata – Rata Capaian Indikator Kinerja							74.96	%

Pagu Anggaran TA. 2017 untuk program ini adalah sebesar **Rp. 114.882.513.586,00** (*Seratus empat belas milyar delapan ratur delapan puluh dua juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2017 adalah sebesar **Rp. 105.204.267.783,00** (*Seratus lima milyar dua ratus empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*), terserap **91.58%** dari pagu anggaran.

Dari tabel 3.4 diatas terlihat ada 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun evaluasi dan analisis capaian setiap indikator kinerja tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi (M³)

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi (M³) ini tidak memenuhi target yang di tetapkan dimana target yang harus dicapai adalah sebesar 1983.75 M³ hanya terealisasi sebesar 734.4 M³, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi (M³)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan, dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman	1 Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m ³)	1983.75 M ³	734.4 M ³	37.02 %

Pagu Anggaran TA. 2017 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **Rp.16.693.964.550,00** (*Enam belas milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2017 nya adalah sebesar **Rp. 15.315.544.188,00** (*Lima belas milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), terserap **91.74%** dari pagu anggaran.

Adapun Indikator kinerja tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m³) ini tidak tercapai dikarenakan terjadi pengurangan anggaran pada APBD- P sebesar **Rp. 21.800.000.000,-** (*Dua puluh satu milyar delapan ratus juta rupiah*), jumlah paket berkurang dari 255 paket menjadi 56 paket, disebabkan administrasi kelengkapan belanja hibah untuk paket tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Pada Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi (M³) ini Terdapat 2 Kegiatan dan 16 tolok ukur diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
- Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
- Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi tolok ukur sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Penyusunan Data Base Air Minum
- 2) Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Bersih 1,2,3,4 KP3B
- 3) Peningkatan Bangunan Instalasi Air Bersih I KP3B
- 4) Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis
- 5) Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Banten Lama
- 6) Sosialisasi Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kawasan banten Lama
- 7) Sosialisasi Pekerjaan Penyediaa Air bersih desa margaluyu dan desa Tanjungan

Dari ke 7 tolok ukur tersebut diatas, 6 tolok ukur mencapai progress fisik **100%** dan 1 tolok ukur mencapai progress fisik sebesar **88.91%** yaitu pada tolok ukur **Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis**, hal ini hal ini disebabkan terdapat 6 paket pekerjaan dari 47 paket pekerjaan yang tidak dapat terlaksana oleh karena beberapa hal seperti tekendalanya mobilisasi material, lokasi/akses jalan yang tidak bisa jangkau oleh kendaraan dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.9.687.146.800,00** (*Sembilan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah*). Realisasi progres fisik adalah sebesar **91.71%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.8.674.131.138,00** (*delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan upiah*) terserap **89.54%** dari pagu anggaran.

Tabel 3.6 Kegiatan Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis Yang Tidak Terlaksana

NO	Tolok Ukur / Paket Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Kp. Sukamaneuh Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	150,000,000.00
2	Kp. Kertasari 1 Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	150,000,000.00
3	Kp. Cigebang Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	150,000,000.00
4	Kp. Malangnengah Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	150,000,000.00
5	Kp. Cidaimah Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	150,000,000.00
6	Kp. Talanca Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	150,000,000.00

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.1 Pembangunan MCK di Kp. Ciapu Desa Tanjung Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.2 Pembangunan MCK di Kp. Mekarsari Desa Tanjung Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.3 Pembangunan MCK di Kp. Cibutun RT 003 RW 004 Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kabupaten Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.4 Pembangunan MCK di Kp. Kadubayun Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.5 Pembangunan MCK di Kp. Cibangkong Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.6 Pembangunan MCK di Kp. Ilham Jaya Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.7 Pembangunan MCK di Kp. Kadulisung Desa Sangiangjaya Kec. Cimarga Kabupaten Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.8 Pembangunan di MCK RT. 1 RW. 12 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.9 Pembangunan MCK di RT. 1 RW. 11 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.10 Pembangunan MCK di RT. 4 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.11 Pembangunan MCK di RT. 01 RW. 5 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.12 Pembangunan MCK di RT. 3 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.13 Pembangunan MCK di RT. 2 RW. 8 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.14 Pembangunan MCK di RT. 2 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang

b. Kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi tolok ukur sebagai berikut ini :

- 1) Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 1 KP3B
- 2) Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 2 KP3B
- 3) Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 3 KP3B
- 4) Penyusunan Data Base Sanitasi
- 5) Pembangunan Kolam Retardasi/Retensi dan Bangunan Pelengkap KP3B Lainnya
- 6) Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan pada Kawasan Strategis
- 7) Pembangunan Drainase Lingkungan Pada Kawasan Banten Lama
- 8) Sosialisasi Pekerjaan Pembangunan Drainase Lingkungan
- 9) Pembangunan Tempat Sampah Pada Kawasan Strategis dan Kawasan Banten Lama

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 7.006.817.750,00** (*tujuh milyar enam juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Realisasi progres fisik adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.641.413.050,00** (*Enam milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu lima puluh rupiah*) terserap **94.79%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 365.404.700,00** (*Tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat juta tujuh ratus rupiah*) atau sebesar **5.21%** merupakan efisiensi belanja makanan dan minuman kegiatan, sisa kontrak serta efisiensi hasil pemeriksaan BPK terkait pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta denda keterlambatan pekerjaan 5 hari untuk pekerjaan **Pembangunan Kolam Retensi/ Retardasi bangunan Pelengkap Lainnya**.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini:



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.15 Pembangunan Drainase Jl. Cikujang - Cibakarang Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.16 Pembangunan Drainase Kp. Sinar Bakti Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.17 Pembangunan Drainase Kp. Bojong Datar Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang

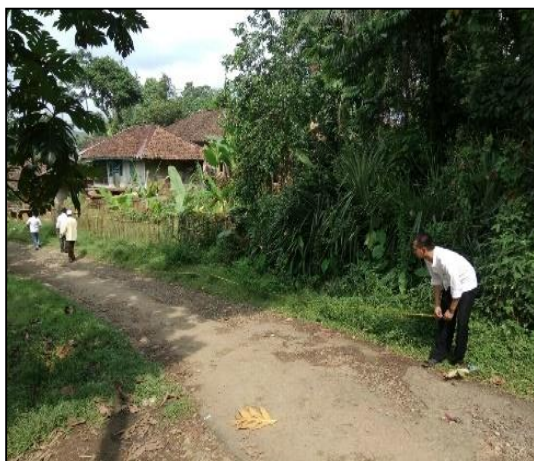


Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.18 Pembangunan Drainase Kp. Mantiung Desa Tanjung Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.19 Pembangunan Drainase Kp. Cibeurih RW. 001 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.20 Pembangunan Drainase Kp. Cibeurih Rw. 002 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.21 Pembangunan Drainase Kp. Cibeurih Rw. 003 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)

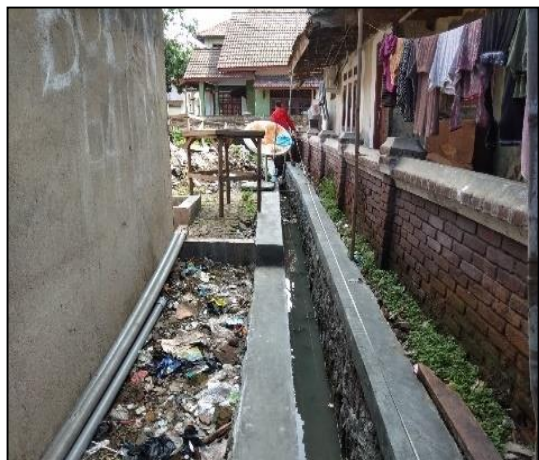


Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.22 Pembangunan Drainase RT. 2 RW. 12 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.23 Pembangunan Drainase RT. 1 RW. 11 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.24 Pembangunan Drainase RT. 3 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.25 Pembangunan Drainase RT. 2 RW. 9 Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.26 Pembangunan TPS RT. 2 RW. 11 Desa Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.27 Pembangunan TPS RT. 1 RW. 11 Desa Banten Lama Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.28 Pembangunan TPS Kp. Pasirkaliki Rt. 3 Rw. 7 Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.29 Pembangunan TPS Kp. Pasirkaliki Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.30 Pembangunan TPS Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak

2. Indikator Kinerja Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman desa/kel (lokasi).

Pencapaian indikator kinerja Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman desa/kel (lokasi) ini tidak memenuhi target yang di tetapkan dimana target yang harus dicapai adalah 113 lokasi hanya terealisasi 71 lokasi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan Dan Pemukiman desa/kel (lokasi)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan, dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman	2 Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel (lokasi)	113 Lokasi	71 Lokasi	62.83 %

Pagu Anggaran TA. 2017 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **Rp. 16.682.109.500,00** (*Enam belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2017 nya adalah sebesar **Rp. 15.537.719.800,00** (*Lima belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah*), terserap **93.14%** dari pagu anggaran.

Adapun indikator kinerja Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan Dan Pemukiman desa/kel (lokasi) Tidak tercapai karena terjadi pengurangan anggaran pada APBD- P sebesar **Rp. 43.100.000.000,00** (*Empat puluh tiga milyar serratus juta rupiah*), jumlah paket berkurang dari 125 paket menjadi 71 paket) disebabkan administrasi kelengkapan belanja hibah untuk paket tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Pada indikator kinerja Kinerja Pembangunan Infrastruktur Perumahan Dan Pemukiman desa/kel (lokasi) ini Terdapat 3 Kegiatan dan 23 tolok ukur diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 ini meliputi 5 tolok ukur dengan 71 paket pekerjaan fisik yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan
- 2) Pembangunan Perdesaan/ kelurahan Terpadu Berbasis Kantong-Kantong Kemiskinan Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Desa Teluk kec. Labuan Kab. Pandeglang
- 3) Pembangunan Perdesaan/ kelurahan Terpadu Berbasis Kantong-Kantong Kemiskinan Desa Margaluyu Kec. Sajira, Dea Cimarga Kec. Cimarga, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga, Desa SangiangJaya Kec. Cimarga, Desa Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak
- 4) Pembangunan Perdesaan/ kelurahan Terpadu Berbasis Kantong-Kantong Kemiskinan Kelurahan Margaluyu Kec. Kasemen , Kel. Warung jaud Kec. Kasemen Kota Serang
- 5) Peningkatan Kualitas Prasarana Lingkungan Kawasan Banten Lama.

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.11.832.670.000,00** (*sebelas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah*). Realisasi progres fisik adalah sebesar **100 %** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.11.570.940.000,00** (*Sebelas milyar lima ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah*) atau terserap sebesar 97.79% dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp.261.730.000,00** (*Dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*) atau **2.21%** merupakan efisiensi belanja makanan dan minuman kegiatan dan sisa kontrak.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan dapat dilihat pada gambar-gambar berikut dibawah ini:



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.31 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikujang Dua Desa Tanjung Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.32 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikujang Timur Desa Tanjung Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.33 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikujang Barat
Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.34 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Pasir Kaliki Desa
Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.35 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Leuwi Panjang
Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.36 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Sukamaneuh Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.37 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikasungka Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.38 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Mekarsari Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

**Gambar 3.39 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cikeusik Geblug
Desa Tanjung Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang**



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

**Gambar 3.40 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cibutun Desa
Tanjung Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang**



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

**Gambar 3.41 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Tanjung Desa
Tanjung Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang**



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%) Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)
Gambar 3.42 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Ciapu Desa
 Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%) Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)
Gambar 3.43 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Cibeurih RW.01
 Desa Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%) Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)
Gambar 3.44 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Ilhamjaya Desa
 Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.45 Pembangunan Jalan Lingkungan di Gg. Swaztika dan Gg. Peterpan Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.46 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kp. Pamarican Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.47 Pembangunan Jalan Lingkungan di Lingk. Paud Ananda Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%) Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)
Gambar 3.48 Pembangunan Jalan Lingkungan di Gg. Syuhada Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang

b. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman
 Kegiatan ini dilaksanakan guna menunjang pembangunan Infrastruktur Kawasan kumuh yang meliputi 13 tolok ukur diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Tangerang Selatan
- 2) DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Tangerang
- 3) DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Lebak
- 4) DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Pandeglang
- 5) DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Serang
- 6) DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Tangerang
- 7) DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Serang
- 8) DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Cilegon
- 9) Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di WKP I (Kabupaten Tangeang, Kota Tangerang, Kota Tangsel)

- 10) Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di WKP II (Kabupaten Kota Serang dan Kota Cilegon)
- 11) Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di WKP II (Kabupaten Pandeglang dan Lebak)
- 12) Rapat Koordinasi Kegiatan DED Infrastruktyur Dasar Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di 8 Kabupaten/Kota
- 13) Konsultan Pendamping Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.3.672.291.500,00** (*Tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukurnya dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.052.357.600,00 (83.12 %)**.

Sisa anggaran sebesar **Rp.619.933.900,00 (16.88%)** merupakan efisiensi belanja pendukung untuk Rapat Koordinasi Kegiatan DED Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di 8 Kabupaten/Kota, efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 6 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak serta sisa kontrak.

c. Penatagunaan Kawasan Permukiman

Kegiatan ini dilaksanakan guna terkendalinya pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan permukiman kumuh dan bencana. Untuk pelaksanaan tahun 2017 kegiatan ini meliputi 4 tolok ukur kegiatan seperti diuraikan dibawah ini:

- 1) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah provinsi Bidang Kawasan Permukiman Kumuh dan Bencana 8 kab/kota
- 2) Penyusunan Pedoman Teknis Penanganan Kawasan kumuh dan Bencana
- 3) Penyusunan SOP Penanganan Kawasan Kumuh dan Bencana
- 4) Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.1.177.148.000,00** (*Satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar 100%

untuk semua tolok ukurnya dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.005.190.000,00** (85.39%).

Sisa anggaran sebesar **Rp.171.958.000,00** (14.61%) merupakan efisiensi honorarium panitia pelaksana kegiatan, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, penggadaans serta efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 2 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak.

3. Indikator Kinerja Penyelesaian Gedung KP3B

Pencapaian indikator kinerja Penyelesaian Gedung KP3B ini sudah mencapai target sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Penyelesaian Gedung KP3B

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan, dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman	3 Penyelesaian Gedung KP3B	1 Gedung	1 Gedung	100 %

Pagu Anggaran TA. 2017 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **Rp. 22.237.472.708,-** (*Dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2017 nya adalah sebesar **Rp. 20.851.618.479,-** (*Dua puluh milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), terserap **93.77%** dari pagu anggaran.

Pada indikator kinerja penyelesaian Gedung KP3B ini Terdapat 3 Kegiatan dan 37 tolok ukur diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana permukiman dengan target 100% tahun 2017 dengan tolok ukur sebagai berikut :

- 1) Perawatan Lift Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

- 3) Pemeliharaan Kebersihan KP3B
- 4) Perawatan Dinding ACP dan Kaca Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten
- 5) Perawatan Utilitas Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten
- 6) Updating Master Plan KP3B
- 7) Rekening Listrik KP3B (Alun-alun KP3B, Landscape Monumen KP3B, Monumen Kayu Fosil KP3B, SKPD Terpadu)
- 8) Perawatan Elektrikal Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten
- 9) Pemeliharaan Atap dan Kubah Masjid Raya Al- Bantani
- 10) Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Laki- laki (Depan) Masjid Raya Al-Bantani
- 11) Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Laki- laki (Belakang) Masjid Raya Al-Bantani
- 12) Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Perempuan Masjid Raya Al-Bantani
- 13) Pemeliharaan Atap Kanopi (Depan) Masjid Raya Al Bantani
- 14) Pemeliharaan Atap Kanopi (Belakang) Masjid Raya Al Bantani
- 15) Perbaikan Pagar depan dan Pengecatan Gapura KP3B
- 16) Perbaikan dan Pengecatan Pos Pengamanan dan Halte di Kp3B
- 17) Perbaikan (Patching) Jalan di Kp3B
- 18) Pemeliharaan AC (4 bulan) SKPD Terpadu
- 19) Pemeliharaan Trotoar Jalan di KP3B
- 20) Pemeliharaan Tempat Sampah di KP3B
- 21) Pembuatan marka Jalan Untuk Parkir di Gedung SKPD Terpadu
- 22) Pemeliharaan Instalasi dan Pemasangan Lampu Taman
- 23) Pemeliharaan Pagar Samping dan Belakang KP3B
- 24) Pemeliharaan Pancaniti dan Utilitas Penunjangnya
- 25) Penataan dan Pemeliharaan Kolam Air Mancur
- 26) Peningkatan Audio Sistem Masjid Raya Al-Bantani
- 27) Penyusunan SOP Pengelolaan KP3B
- 28) Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.7.644.859.375,00** (*tujuh milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*). Realisasi progres fisik

adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.349.532.504,00** (*Tujuh milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat rupiah*), atau sebesar **(96.14%)** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 295.326.871,00** (*Dua ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah*) atau **(3.86%)** merupakan efisiensi belanja listrik, penggandaan dan sisa kontrak. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar berikut:



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.49 Pemeliharaan Atap Kanopi (Depan) Masjid Raya Al Bantani



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.50 Pemeliharaan Pemeliharaan Atap Dan Kubah Mesjid Raya Al-Bantani



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.51 Pemeliharaan Pagar Samping dan Belakang KP3B



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.52 Pemeliharaan Instalasi dan Pemasangan Lampu Taman

b. Pembangunan Gedung Kantor di KP3B

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatnya efektifitas kerja dengan tersedianya fasilitas gedung kantor yang memadai dengan target 100% tahun 2017.

- 1) Landscape Gedung Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten
- 2) Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II)
- 3) Rehab Plaza Masjid
- 4) Data Base Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
- 5) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
- 6) Pengadaan dan Pemasangan Kabel Listrik NYFGbY Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten
- 7) Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap IV)

8) Penambahan Ruang Gudang Arsip

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.13.608.341.180,00** (*Tiga belas milyar enam ratus delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar 98%, 7 tolok ukur tercapai 100% serta 1 tolok ukur tidak dilaksanakan karena bukan tupoksi seksi Penataan Bangunan (merupakan tupoksi UPT KP3B) dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 12.721.816.822,00** (*Dua belas milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*) atau terserap sebesar **93.49 %** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp.886.521.358,00** (*Delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah*) atau **6.51%** merupakan efisiensi belanja penggandaan, promosi dan publikasi, honorarium pokja, efisiensi hasil pemeriksaan BPK terkait beberapa pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi untuk paket interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II), Pembangunan Plaza Aspirasi dan Landspace Gedung Dinas SDA an Permukiman Provinsi Banten (denda keterlambatan pekerjaan 10 hari) serta penambahan gudang ruang arsip yang tidak dilaksanakan karena bukan tidak sesuai tupoksi seksi Penataan Bangunan (merupakan tupoksi UPT KP3B). Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B dapat dilihat pada gambar berikut:



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.53 Landscape Gedung Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.54 Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II)



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.55 Rehab Plaza Masjid



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.56 Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap IV)

c. Pembangunan Gedung kantor KP3B (Pembayaran Kewajiban TA.2016) Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan efektifitas kerja dengan tersedianya fasilitas Gedung kantor yang memadai untuk pembayaran kewajiban TA. 2016. Adapun tolok ukur yang dilaksanakan adalah penambahan Ruang Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten (Tahap III).

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 984.272.153,00** (*Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukurnya dan realisasi keuangan sebesar **Rp.780.269.153,00** (*Tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah*) atau **(79.27%)**. Sisa anggaran sebesar **Rp.204.003.000,00** (*dua ratus empat juta tiga ribu rupiah*) atau sebesar **(20.73%)** merupakan efisiensi hasil pemeriksaan/audit inspektorat.

4. Indikator Kinerja Pembangunan Gedung Kantor Sebanyak 15 Gedung

Pencapaian indikator kinerja Pembangunan Gedung Kantor Sebanyak 15 Gedung ini sudah mencapai target sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Gedung Kantor Sebanyak 15 Gedung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pengembangan, dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman	3 Pembangunan Gedung Kantor Sebanyak 15 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100 %

Pagu Anggaran TA. 2017 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar **Rp. 59.268.966.828,-** (*Lima puluh Sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2017 nya adalah sebesar **Rp. 53.408.617.516,-** (*lima puluh tiga milyar empat ratus delapan utu enam ratus*

tujuh belas ribu lima ratus enam belas rupiah), terserap **90.11%** dari pagu anggaran.

Pada indikator kinerja penyelesaian Gedung KP3B ini Terdapat 5 Kegiatan dan 40 tolok ukur diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatnya efektifitas kerja dengan tersedianya fasilitas gedung kantor yang memadai dengan target 100% pada tahun 2017.
 - 1) Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten
 - 2) Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II)
 - 3) Pembangunan Gedung Kantor dan Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II)
 - 4) Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II)
 - 5) Landscape Gedung Padepokan Silat
 - 6) Bimbingan Teknis PP Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 - 7) Data Base Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Di Luar KP3B
 - 8) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
 - 9) Pembayaran Listrik Gedung Kantr Tahun 2016 di Luar KP3B
 - 10) Penyusunan Pergub Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Teknis dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Lingkup OPD Provinsi Banten dan Instansi Vertikal
 - 11) Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung
 - 12) Interior Ruang Kerja KEJATI Provinsi Banten

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. **47.665.745.668,00** (*Empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **97,38%** dimana 10 tolok ukur tercapai **100%** serta 2 tolok ukur putus kontrak yaitu Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Provinsi Banten tercapai progres fisik **92.94%** serta Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II) tercapai progres fisik **97.28%**. dan realisasi keuangan sebesar **Rp.43.423.252.996,00** (*Empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah*) atau sebesar **91.10 %**.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 4.242.492.672,00** (*Empat milyar dua ratus empat puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau sebesar **8.90%** merupakan efisiensi belanja penggandaan, promosi dan publikasi, honorarium pokja dan belanja listrik, efisiensi hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi untuk paket Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II), Pembangunan Gedung Kantor dan Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II) dan Landscape Gedung Padepokan Silat, Putus kontrak untuk paket pekerjaan Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dengan progres fisik **92,94%** karena ada pekerjaan belum selesai (pengecatan dan dincing ACP pos jaga) dan Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II) dengan progres fisik **97,28%** karena ada pekerjaan yang belum selesai (pengecatan dan pemasangan dimding ACP pada drop off) serta Terdapat efisiensi/sisa anggaran untuk paket pengadaan alat(tidak boleh dilaksanakan sesuai arahan peneliti. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut:



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.57 Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.58 Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II)



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.59 Pembangunan Gedung Kantor dan Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II)



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.60 Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II)



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.61 Landscape Gedung Padepokan Silat



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.62 Interior Ruang Kerja KEJATI Provinsi Banten

b. Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciaptakaryaan Lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung dan lingkungan dengan target 100% pada tahun 2017.

- 1) DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kec. Bayah Kabupaten Lebak
- 2) DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kec. Maja Kab. Lebak
- 3) DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang
- 4) SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kwsn. Strategis ekonomi Kec. Bojonegoro di Kab. Serang
- 5) SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kecamatan Kasemen Kota Serang
- 6) SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang
- 7) Perencanaan Penyediaan Air Bersih dan Perluasan Area Seren Taun pada Kawasan Kaolotan
- 8) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
- 9) Kompilasi Data Perencanaan Bangunan Gedung
- 10) Review Masterplan Pembangunan TPST Bojong Menteng
- 11) Studi Kelayakan Lokasi Rumah Jabatan Pimpinan Daerah
- 12) Studi Kebutuhan Anggaran Penataan Banten Lama
- 13) Kajian Penetapan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
- 14) Kompilasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Permukiman
- 15) DED GOR Mini Kawasan KP3B
- 16) DED Gedung PKK Provinsi Banten
- 17) Review DED Pujasera KP3B

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.3.664.419.400,00** (*Tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah

sebesar **97.19 %**, dimana 16 tolok ukur progres fisik tercapai **100%** serta 1 tolok ukur dengan progres fisik hanya **64.27%** karena terdapat item pekerjaan forum Konsultasi Publik Review Masterplan Pembangunan TPST Bojong Menteng yang tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.104.245.000,00** (*Tiga milyar serratus empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar **84.71 %** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp.560.174.400,00** (*Lima ratus enam puluh juta serratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah*) atau **15.29%** merupakan efisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 7 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak, Forum Konsultasi Publik Review Masterplan Pembangunan TPST Bojong Menteng yang tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi serta sisa kontrak.

c. Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman

Kegiatan ini dilaksanakan guna Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

- 1) Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
- 2) Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan
- 3) Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B
- 4) Pengawasan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan
- 5) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman
- 6) Rapat Koordinasi Evaluasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.2.231.250.000,00** (*Dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar 100% untuk semua tolok ukurnya dan realisasi keuangan sebesar Rp. **2.001.156.000,00** (*Dua milyar satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) atau sebesar **89.69%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 230.094.000,00** (*dua ratus tiga puluh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah*) atau **10.31%** merupakan sisa kontrak.

d. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung ketersediaan dokumen perencanaan bidang perumahan dan permukiman.

- 1) Jakstra dan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah dan Sanitasi Provinsi Banten
- 2) Jakstra dan Rencana Induk Pengembangan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Provinsi Banten
- 3) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.1.195.085.500,00** (*Satu milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukurnya dan realisasi keuangan sebesar **Rp.990.085.500,00** (*Sembilan ratus sembilan puluh juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar **82.85 %** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp.205.000.000,00** (*dua ratus lima juta rupiah*) atau sebesar **(17.15%)** merupakan efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 2 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak.

e. Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (pembayaran Kewajiban TA. 2016)

Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan efektifitas kerja dengan tersedianya fasilitas Gedung kantor yang memadai.

- 1) Pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, PUSDALOPS DAN Kelengkapan Operasional Laiinya (Tahap II)
- 2) Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap I)

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.4.512.466.260,00** (*empat milyar lima ratus dua belas juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukurnya dan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.899.878.020,00** (*Tiga milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh rupiah*) atau sebesar **86.20%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp.622.588.240,00** (*Enam ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*) atau sebesar **13.80%** merupakan efisiensi hasil pemeriksaan/audit inspektorat.

2. Program Pembinaan dan Penataan Perumahan

Pencapaian Indikator Kinerja Program pembinaan dan penataan perumahan dapat dilihat dalam tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Program Pembinaan Dan Penatan Perumahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Pembinaan dan Penataan Perumahan	1 Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20 %	6.40 %	32.00 %
Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja					32.00 %

Pagu Anggaran TA. 2017 untuk program ini adalah sebesar **Rp. 32.765.406.000,-** (*tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus enam ribu rupiah*) dan Realisasi Anggaran TA. 2017 adalah sebesar **Rp.10.148.194.600,-** (*sepuluh milyar seratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah*), terserap **30.97%** dari pagu anggaran.

Adapun evaluasi dan analisis capaian setiap indikator kinerja tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Indikator Kinerja Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Pembinaan dan Penataan Perumahan. Selama periode 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam program ini.

a. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

- 1) Penyusunan Program Pengembangan Perumahan
- 2) Pendataan Kajian Calon Hunian
- 3) SID Pengembangan prototype type rumah hunian horizontal dan vertical
- 4) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
- 5) Pengawasan Pembangunan RTLH TA. 2017
- 6) Pengawasan Pembangunan RTLH Pada Kawasan Startegis Banten Lama
- 7) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan RTLH
- 8) Penyusunan Laporan Capaian SPM Bidang Perumahan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.1.799.255.000,00** (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukurnya dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.660.578.000,00** (*satu milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) atau sebesar **92.29%**.

Sisa anggaran sebesar **Rp.138.677.000,00** (*seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) atau sebesar **7.71%** merupakan efisiensi belanja jasa tenaga ahli serta efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 3 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak.

b. Pembinaan dan Penataan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung Pembinaan dan Penataan Perumahan.

- 1) Evaluasi Pembangunan Rumah Tidak layak Huni
- 2) Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang
- 3) Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang
- 4) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan (Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Kegiatan dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun)

- 5) Koordinasi Stimulan Pembangunan Rumah
- 6) Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak layak Huni
- 7) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 4.915.151.000,-** (*empat milyar sembilan ratus lima belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **97.97 %**, dengan 6 tolok ukur realisasi fisik 100 % dan 1 tolok ukur tercapai realisasi fisik **77.95 %** dikarenakan terdapat 2 paket pekerjaan pembangunan RTLH tidak dapat direalisasikan karena penerima bansos tidak menyetujui pembangunan rumah tersebut dan *realisasi keuangan sebesar Rp.4.784.035.000,- (97.31%)*.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 132.116.000,- (2.69%)** merupakan efisiensi perlengkapan peserta, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, dokumentasi, promosi dan publikasi, pengadaan serta pembangunan 2 unit RTLH di Kota Serang/ kasemen tidak dilaksanakan karena yang bersangkutan (penerima bantuan) tidak menyetujui pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ini dapat dilihat sebagai berikut :



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%) Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)
Gambar 3.63 Pembangunan RTLH di Desa Margaluyu, Kec. Sasjira
Kab. Lebak



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%) Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)
Gambar 3.64 Pembangunan RTLH di Desa Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang

c. Penatagunaan Pengembangan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman

- 1) Penatagunaan Pengembangan Perumahan
- 2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Bidang Perumahan 8 Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten
- 3) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan
- 4) Sinergitas Program Pengembangan dan pembangunan Perumahan
- 5) Penyusunan naskah Akademis RAPERDA Pembiayaan Perumahan Untuk MBR
- 6) Penyusunan naskah Akademis RAPERDA Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.2.700.000.000,00** (*dua milyar tujuh ratus juta rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **92.63%**, dimana 5 tolok ukur tercapai realiasi fisik **100%** dan 1 tolok ukur tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.380.802.000,00** (*dua milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus dua ribu rupiah*) atau sebesar **88.18%**.

Sisa anggaran sebesar **Rp.319.198.000,00** (*tiga ratus Sembilan belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) atau sebesar **11.82%** merupakan efisiensi belanja pengadaan, sewa ruang rapat/ tempat

pertemuan, makanan dan minuman kegiatan, jasa narasumber, efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 3 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak serta 1 paket pekerjaan penyusunan naskah Akademis RAPERDA Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

d. Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

- 1) Penyelenggaraan PSU Permukiman
- 2) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan
- 3) Koordinasi Penyediaan Pembangunan Perumahan
- 4) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Penyelenggaraan Pembangunan RTLH tahun 2018

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 950.000.000,00** (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukurnya dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 866.874.600,00** (*Delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah*) atau sebesar **91.25%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 83.125.400,00** (*Delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah*) atau sebesar **8.75%** merupakan efisiensi belanja penggandaan, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, honorarium pejabat/ pokja pengadaan.

e. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman.

- 1) Pengembangan Lahan Pembangunan Perumahan
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Pengadaan Lahan
- 3) Pengadaan Lahan Banten Lama

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 22.400.000.000,00** (*dua puluh dua milyar empat ratus juta rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **2.05%**, dimana 2 tolok

ukur tercapai realiasi fisik **100%** dan 1 tolok ukur tidak dilaksanakan yaitu pengadaan lahan di Banten Lama karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dan realisasi keuangan sebesar **Rp.455.950.000,00** (*empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar **(2.04%)** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 21.944.050.000,00** (*dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah*) atau sebesar **97.96%** merupakan Pengadaan lahan yang tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi.

3. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja Program pembinaan dan penataan perumahan dapat dilihat dalam tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket	1 Paket	100 %
Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja					100.00 %

Program ini dilaksanakan dalam rangka ketersediaan data dan informasi pembangunan. Selama periode 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam program ini.

Realisasi fisik program ini 100 % dengan penyerapan keuangan **Rp.523.825.000,-** (99.78%). Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung ketersediaan data dan informasi pembangunan

- Penyediaan Data Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Pemeliharaan Jaringan Komputer Dan Sistem Telematika Data Base Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
- Update Buku Data dan Informasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017

- d. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Publikasi Informasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 525.000.000,00** (*lima ratus dua puluh lima juta rupiah*). Realisasi progres fisik kegiatan ini adalah sebesar **100%** untuk semua dan realisasi keuangan sebesar **Rp.523.825.000,00** (*lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) atau terserap **99.78%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp.1.175.000,- (0.22%)** merupakan efisiensi/sisa kontrak.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Indikator Pendukung

Dari kelima sasaran strategis tersebut terdapat 2 (Dua) sasaran strategis yang menjadi **Indikator Kinerja Pendukung** yaitu Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur. dimana rincian dan analisis terhadap capaian sasaran strategis tersebut beserta indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Indikator kinerja rasio ketersediaan penatausahaan, pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan.

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terwujudnya opini audit BPK dengan target WTP tahun 2017
 - 1) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
 - 2) Penyusunan Buku/Himpunan SPP,SPM dan Sp2D Semeseteran Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Prov.Banten
 - 3) Konsultasi Sistem Gaji Taspen dengan Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman
 - 4) Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan Pengembalian Belanja Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman
 - 5) Penyusuna Data Prognosis TA.2017 Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Prov.Banten
 - 6) Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Ta.2017

- 7) Rekonsiliasi Data Aset APBD TA.2017
- 8) Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Provinsi Banten
- 9) Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan Dinas PKP
- 10) Pelaporan Pengelolaan Arsip Dinas PKP Prov.Banten
- 11) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.165.990.000,00** (*Seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*). Terdapat 11 tolok ukur dengan realisasi progres fisik adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.141.909.000,00** (*seratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah*) atau terserap sebesar **85.49%** dari pagu anggaran. Sisa anggaran sebesar **Rp. 24.081.000,00** (*dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu rupiah*) merupakan efisiensi belanja tenaga ahli.

2. Indikator kinerja rasio ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2017.

- 1) Penyusunan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2016
- 2) Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2016
- 3) Penyusunan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2016
- 4) Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017
- 5) Penyusunan Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan APBD dan APBN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017
- 6) Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017

- 7) Forum Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017- 2023
- 8) Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FSKPD) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se- Provinsi Banten Tahun 2017
- 9) Penyusunan RKA-P /DPPA APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017
- 10) Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2018
- 11) Penyusunan RKA /DPA APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2018
- 12) Monitoring Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber Dana APBD TA. 2017
- 13) Workshop Penyusunan DRPK Tahun 2018
- 14) Penyusunan Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018
- 15) Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Pelaksanaan Pembangunan TA. 2017 dan Pedoman Penyusunan RKA TA. 2018
- 16) Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa (RUP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2017
- 17) Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber Dana APBD Provinsi Banten TA. 2017
- 18) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017
- 19) Penyusunan Peraturan Gubernur Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017
- 20) Penyusunan Updating Katalog Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2008- 2017
- 21) Penyusunan Rencana kerja Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
- 22) Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

- 23) Penyusunan Data Base Kajian Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017
- 24) Sosialisasi Penyelenggaraan Hibah/Bansos Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA.2017
- 25) Rapat Koordinasi Keterpaduan Penyelenggaraan Program dan Anggaran Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 26) Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak/E- Kontrak

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.1.100.908.100,00** (*Satu milyar seratus juta sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah*). Terdapat 26 tolok ukur dengan realisasi progres fisik adalah sebesar 100% untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.050.082.700,00** (*satu milyar lima puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) (95.38%). Sisa anggaran sebesar **Rp.50.825.400,00** (*lima puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah*) merupakan efisiensi penggandaan, belanja sewa tempat, ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, belanja perlengkapan peserta, sisa kontrak.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1. Indikator rasio pembangunan, pengadaan, peeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan keuangan **80 %** pada tahun 2017.

- 1) Pengadaan GPS
- 2) Pengadaan Peralatan Studio Visual
- 3) Pengadaan Peralatan Personal Komputer
- 4) Pengadaan Personal Komputer
- 5) Penyusunan RKBMD Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PKP TA. 2018
- 6) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PKP TA. 2017
- 7) Penataan Ruang Kepala Dinas

- 8) Peningkatan Ruang Sekretaris Dinas
- 9) Kelengkapan Ruang Rapat Dinas
- 10) Pengadaan Barang Jasa Vertikal Blind
- 11) Pengadaan Barang Jasa Kaca Film
- 12) Pengadaan Barang Jasa Peralatan Komputer
- 13) Pengadaan Barang Jasa Mesin Pel, Mesin Genset
- 14) Pengadaan Projector, Infocur Projector, Televisi LCD, Printer Scanner A3, Pesawat Telepon
- 15) Pengadaan Printer A3 Warna, Printer laserjet A3, Epson L -120
- 16) Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
- 17) Pengadaan Mesin PABx
- 18) Pengadaan PC All In one
- 19) Pengadaan Kursi Stainless
- 20) Pengadaan Audio Room
- 21) Pengadaan Camera Digital; Camera XLR, Camera Gopro, Kunci Pintu Otomatis Finger Print dan Kartu
- 22) Pengadaan Plang nama Dinas Elektrik
- 23) Pengadaan CCTV, Hardisk Eksternal, Digital Pocket Cam dan Safety Ware
- 24) Pengadaan Meja Eselon 2 dan 3; Pengadaan Kursi Pejabat
- 25) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantin dan Front Office
- 26) Pengadaan Barang Jaringan Server Internet

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.3.125.100.000,00** (*tiga milyar seratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah*), sampai dengan Desember 2017 realisasi progres fisik adalah sebesar **97.78%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.835.730.450,00** (*dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) atau terserap sebesar **90.74%** dari pagu anggaran. Dari 26 tolok ukur hanya terdapat 1 tolok ukur yang tidak tercapai/terlaksana yaitu paket plang nama dinas elektrik dikarena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi dimana tolok ukur tersebut dianggarkan pada APBD-P TA. 2017. Sisa anggaran sebesar **Rp.289.369.550,00** (*dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah*) merupakan

efisiensi penggandaan, sisa kontrak dan 1 paket pengadaan yang tidak dilaksanakan.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kp3B

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang memadai serta terpeliharanya kawasan (KP3B) dengan target **100%** tahun 2017.

- 1) Pengadaan Genset SKPD Terpadu
- 2) Instalasi Genset SKPD Terpadu
- 3) Pengadaan Tangki Solar Genset Gedung SKPD Terpadu
- 4) Pengadaan BBM Solar Genset
- 5) Pekerjaan penataan TPST KP3B
- 6) Pengadaan Alat Pendukung Penolahan Sampah TPST KP3B
- 7) Biaya Penambahan Daya Listrik PLN/ Tambah Daya Pendukung TPST Kp3B
- 8) Penambahan kabel Suply Gedung SKPD Terpadu
- 9) Pengadaan Motor Roda Tiga Sampah Dump Hidrolik pendukung TPST Kp3B
- 10) Pengadaan Motor Roda Tiga Sampah pendukung TPST Kp3B
- 11) Pengadaan Motor Opsional Lapangan Kp3B
- 12) Pengadaan Mobil Alat Angkut Sampah Arm rol + Container Tertutup pendukung TPST KP3B
- 13) Pengadaan Mobil Operasional Lapangan Pick Up
- 14) Pengadaan Alat Mesin pemotong Rumput Gendong
- 15) Pengadaan Alat mesin Gergaji Kayu
- 16) Pengadaan Drone camera + Accesories
- 17) Pengadaan Alat Ukur meteran Dorong Digital Measuring Wheel
- 18) Pengadaan Alat pemetaan GPS Camera
- 19) Pengadaan Pompa Sedot Air
- 20) Pembuatan Canopy Parkir Gedung SKPD Terpadu
- 21) Revitalisasi Taman Jam
- 22) Revitalisasi Taman Batu Fossil
- 23) Pengadaan Garbage Truck Compactor Kap. 6,5 m3
- 24) Pengadaan Garbage Truck Compactor Kap. 10 m3
- 25) Instalasi CCTV + Accesories SKPD Terpadu

- 26) Pengadaan Tempat Sampah Tutup Roda Dorong
- 27) DED Workshop UPT KP3B
- 28) Konsultan Individu Survey Inventariasi Kebutuhan Sarana Prasarana KP3B
- 29) Pengadaan Mobil Sapu Jalan
- 30) Pembebasan Lahan Masjid Kecil KP3B
- 31) Pembebasan Lahan KP3B
- 32) Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APART) SKPD Terpadu
- 33) Pengadaan Alat Dokumentasi Lapangan Camera DSLR
- 34) Konsultan Pengawas Pekerjaan penataan TPST Kp3B
- 35) Konsultan Pengawas Pekerjaan Revitalisasi Taman Jam
- 36) Konsultan Pengawas Pekerjaan Revitalisasi Taman Fossil
- 37) Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembuatan Canopy Gedung SKPD Terpadu
- 38) Konsultan Pengawasan Pemagaran Masjid Pengganti
- 39) Konsultan Appraisal Pengembangan Lahan KP3B

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.93.233.045.127,00** (*Sembilan puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*). Realisasi progres fisik adalah sebesar 18.13 % dan realisasi keuangan sebesar **Rp.15.827.470.898,00** (*lima belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau terserap sebesar **16.98%** dari pagu anggaran.

Pada kegiatan tersebut terdapat 39 tolok ukur dengan progres **100%** untuk 33 tolok ukur dan 6 tolok ukur tidak dilaksanakan dengan rincian seperti terlihat pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Rekapitulasi paket/tolok ukur yang tidak dilaksanakan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B

No	Tolok Ukur	Keterangan
1.	Instalasi Genset SKPD Terpadu	Pengadaan instalasi genset dan tangki solar gedung SKPD terpadu yang tidak dilaksanakan karena Terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (± 2 bulan), Instalasi bisa dilaksanakan setelah pengadaan genset tersedia, dimana dalam

No	Tolok Ukur	Keterangan
2.	Pengadaan Tangki Solar Genset Gedung SKPD Terpadu	pelaksanaannya keterlambatan pengiriman genset
3.	Pengadaan Motor Opsional Lapangan Kp3B	Pengadaan motor yang tidak dilaksanakan karena pihak penyedia jasa membatalkan kontrak karena unit motor tidak tersedia.
4.	Pembebasan Lahan KP3B	Pengadaan lahan KP3B seluas 14.390 m2 dan konsulan apraisal yang tidak dilaksanakan karena penganggaran pada APBD-P sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
5.	Konsultan Pengawasan Pemagaran Masjid Pengganti	Pekerjaan pemagaran masjid dan Konsultan Pengawasan tidak dilaksanakan karena pembelian tanah untuk masjid baru selesai dibayarkan/ dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017 sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi
6.	Konsultan Appraisal Pengembangan Lahan KP3B	

Sisa anggaran sebesar **Rp.15.827.470.898,00** (*lima belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*) merupakan efisiensi sisa kontrak serta 6 paket/tolok ukur yang tidak dilaksanakan. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana KP3B dapat dilihat pada gambar-gambar berikut :



Gambar 3.65 Pengadaan Mobil Sapu Jalan (Road Sweeper) Kapasitas 4 M3 sebanyak 2 unit



Gambar 3.66 Pengadaan Truk Sampah *Compactor* Kap. 6,5 M3 dan 10 M3 Sebanyak 2 unit



Gambar 3.67 Pengadaan Truk Sampah *Arm roll* Sebanyak 2 unit



Gambar 3.68 Pengadaan Mobil Operasional Lapangan Pick Up sebanyak 1 unit



Gambar 3.69 Pengadaan Motor Roda Tiga Sampah pendukung TPST Kp3B Sebanyak 6 Unit



Gambar 3.70 Penataan TPST KP3B



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.71 Revitalisasi Taman Jam



Kondisi Sebelum Dikerjakan (0%)



Kondisi Sesudah Dikerjakan (100%)

Gambar 3.72 Revitalisasi Taman Batu Fossil

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam mendukung indek kemandirian daerah dengan target **77.30%** tahun 2017.

- 1) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3
- 2) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4
- 3) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6
- 4) Pemeliharaan Peralatan Kantor
- 5) Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer
- 6) Pemeliharaan Infocus
- 7) Belanja Bahan/Bibit Tanaman
- 8) Pemeliharaan Alat Komunikasi
- 9) Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.1.750.000.000,00** (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*). Terdapat 9 tolok ukur dengan realisasi progres fisik adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.392.982.300,00** (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) atau sebesar **79.60%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 357.017.700,00** (*Tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah*) merupakan efisiensi belanja jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas, pajak kendaraan bermotor, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan

komputer/laptop, pemeliharaan alat komunikasi dan sisa kontrak gedung.

d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dalam mendukung indeks kemandirian daerah dengan target **77.30%** tahun 2017.

- 1) Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B
- 2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.29.000.000,00** (*Dua puluh sembilan juta rupiah*). Terdapat 2 tolok ukur dengan realisasi progres fisik adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.740.000,00** (*empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*) atau terserap sebesar **16.34%** dari pagu anggaran. Sisa anggaran sebesar **Rp.24.260.000,00** (*dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) merupakan efisiensi honorarium pengadaan barang/jasa, belanja listrik dan pemeliharaan alat komunikasi.

e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kelembagaan dan ketata-laksanaan Pemerintah Daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi dengan target 100 % tahun 2017.

- 1) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan
- 2) Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola KP3B

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.471.000.000,00** (*empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah*). Terdapat 3 tolok ukur dengan realisasi progres fisik adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar Rp.447.074.600,00 (95.13%). Sisa anggaran sebesar Rp. 22.925.400,00 merupakan efisiensi honorarium pengadaan barang/jasa dan sisa kontrak pengadaan alat ukur, peralatan kantor, perlengkapan kantor.

2. Indikator rasio penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatnya rasio kemandirian daerah dengan target 77 % tahun 2017.

- 1) Pameran Display Banten Expo pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 2) Penyedia Barang dan Jasa Perkantoran
- 3) Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan Pada Media massa
- 4) Peringatan Hari Bhakti PU
- 5) Inventarisasi Barang Milik Negara

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.4.917.644.625,00** (*Empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*). Terdapat 5 tolok ukur dengan realisasi progres fisik adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.498.390.161,00** (empat milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah) atau terserap sebesar **91.47%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp. 419.254.464,00** (*empat ratus Sembilan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*) merupakan efisiensi belanja tenaga ahli, sewa tempat, belanja listrik, telepon, faximili, surat kabar, jasa kebersihan, promosi dan publikasi, makanan dan minuman kegiatan, extra fooding, narasumber, sewa tenda, dekorasi dan sisa kontrak ATK dan pengadaan pakaian korpri.

b. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT pengelolaan KP3B

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dalam mendukung indeks kemandirian daerah dengan target **77.30%** tahun 2017.

- 1) Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
- 2) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Pengelolaan KP3B

- 3) Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B
- 4) Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.500.000.000,00** (*Lima ratus juta rupiah*). Terdapat 4 tolok ukur dengan realisasi progres fisik adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.426.713.000,00** (*empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*) atau terserap sebesar **85.34%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp.73.287.000,00** (*tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) merupakan efisiensi belanja makanan dan minuman rapat, promosi dan publikasi, surat kabar dan honorarium pokja dan ATK.

3. Indikator Rasio Pembinaan dan Peningkatan, Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatnya rasio kemandirian daerah dengan target 77.30 % tahun 2017

- 1) Bimbingan teknis kearsipan
- 2) Workshop Pembangunan dalam Media
- 3) Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Bimbingan penyusunan SOP dan SP
- 5) Pembinaan Kepegawaian Aparatur Dinas
- 6) Pembinaan Kepegawaian Non PNS pada Dinas
- 7) Pengiriman Diklat Teknis/ Kursus Singkat/ Pelatihan*) pada Aparatur Dinas
- 8) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Perumahan
- 9) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Kawasan Permukiman
- 10) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Infrastruktur Permukiman
- 11) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Subbag Umum dan Kepegawaian

12) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Subbag PEP dan Keuangan

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.429.997.200,00** (*Empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*). Terdapat 12 tolok ukur dengan realisasi progres fisik adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.165.864.000,00** (*seratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) atau terserap sebesar **38.57%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar Rp.264.133.200,00 (*dua ratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) merupakan Efisiensi belanja sewa tempat/ruang rapat, jasa narasumber/tenaga ahli, pengadaan dan biaya pengiriman kursus/diklat (biaya diklat untuk peserta sudah terfasilitasi dari diklat di Kementerian PUPR).

4. Indikator Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Dan Ke Luar Daerah

a. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatnya rasio kemandirian daerah dengan target 77.30 % tahun 2017.

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- 2) Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.3.100.000.000,00** (*tiga milyar seratus juta rupiah*). Terdapat 2 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar **100%** untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.060.966.902,00** (*dua milyar enam puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah*) atau terserap sebesar **66.48%** dari pagu anggaran.

Sisa anggaran sebesar **Rp.1.039.033.098,00** (*satu milyar tiga puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah*) merupakan efisiensi belanja SPPD dalam dan luar daerah.



3.3. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
							Rp	%			
A	Belanja Tidak langsung		17,910,000,000.00	6.51	100.00	100.00	17,130,731,144.00	95.65	779,268,856.00	4.35	Efisiensi berdasarkan potongan Tambahan Penghasilan Beban Kerja sesuai dengan nilai SKP
B	Belanja Langsung		256,995,604,638.00	93.49	100.00	60.67	144,729,256,394.00	56.32	112,266,348,244.00	43.68	
I	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1,266,898,100.00	0.46			1,191,991,700.00	94.09	74,906,400.00	5.91	
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	165,990,000.00	0.06	100.00	100.00	141,909,000.00	85.49	24,081,000.00	14.51	Efisiensi belanja tenaga ahli
	2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,100,908,100.00	0.40	100.00	100.00	1,050,082,700.00	95.38	50,825,400.00	4.62	Efisiensi penggunaan, belanja sewa tempat, ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, belanja perlengkapan peserta, sisa kontrak



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
							Rp	%			
II		Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	107,555,786,952.00	39.12			27,660,932,311.00	25.72	79,894,854,641.00	74.28	
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3,125,100,000.00	1.14	100.00	97.78	2,835,730,450.00	90.74	289,369,550.00	9.26	Efisiensi penggunaan, sisa kontrak dan Pengadaan Plang nama Dinas Listrik yang tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi
	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,750,000,000.00	0.64	100.00	100.00	1,392,982,300.00	79.60	357,017,700.00	20.40	Efisiensi belanja jasa servise, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas, pajak kendaraan bermotor, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan komputer/laptop, pemeliharaan alat komunikasi dan sisa kontrak gedung



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
							Rp	%			
5		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,917,644,625.00	1.79	100.00	100.00	4,498,390,161.00	91.47	419,254,464.00	8.53	Efisiensi belanja tenaga ahli, sewa tempat, belanja listrik, telepon, faximili, surat kabar, jasa kebersihan, promosi dan publikasi, makanan dan minuman kegiatan, extra fooding, narasumber, sewa tenda, dekorasi dan sisa kontrak ATK dan pengadaan pakaian korpri.
6		Peningkatan Kapasitas Aparatur	429,997,200.00	0.16	100.00	100.00	165,864,000.00	38.57	264,133,200.00	61.43	Efisiensi belanja sewa tempat/ ruang rapat, jasa narasumber/ tenaga ahli, pengadaan dan biaya pengiriman kursus/ diklat (biaya diklat untuk peserta sudah terfasilitasi dari diklat di Kementerian PUPR)
7		Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	3,100,000,000.00	1.13	100.00	100.00	2,060,966,902.00	66.48	1,039,033,098.00	33.52	Efisiensi belanja SPPD dalam dan Luar Daerah



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
							Rp	%			
8		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	500,000,000.00	0.18	100.00	100.00	426,713,000.00	85.34	73,287,000.00	14.66	Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat, promosi dan publikasi, surat kabar dan honorarium pokja dan ATK
9		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	29,000,000.00	0.01	100.00	100.00	4,740,000.00	16.34	24,260,000.00	83.66	Efisiensi honorarium pengadaan barang/jasa, belanja listrik dan pemeliharaan alat komunikasi
10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	471,000,000.00	0.17	100.00	100.00	448,074,600.00	95.13	22,925,400.00	4.87	Efisiensi honorarium pengadaan barang/jasa dan sisa kontrak pengadaan alat ukur, peralatan kantor, perlengkapan kantor



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN				PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
								Rp	%			
11			Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	93,233,045,127.00	33.91	100.00	18.13	15,827,470,898.00	16.98	77,405,574,229.00	83.02	Pengadaan instalasi genset dan tangki solar gedung SKPD terpadu yang tidak dilaksanakan karena Terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (± 2 bulan), Instalasi bisa dilaksanakan setelah pengadaan genset tersedia, dimana dalam pelaksanaannya keterlambatan pengiriman genset
												Pengadaan motor yang tidak dilaksanakan karena pihak penyedia jasa membatalkan kontrak karena unit motor tidak tersedia.
												Pengadaan lahan KP3B seluas 14.390 m2 dan konsulan apraisal yang tidak dilaksanakan karena penganggaran pada APBD-P sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN				PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
								Rp	%		
											Pekerjaan pemagaran masjid dan Konsultan Pengawasan sanakan karena pembelian tanah untuk masjid baru selesai dibayarkan/ dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017 sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi
III			Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	114,882,513,586.00	41.79			105,204,267,783.00	91.58	9,678,245,803.00	8.42
	12		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	9,687,146,800.00	3.52	100.00	91.74	8,674,131,138.00	89.54	1,013,015,662.00	10.46
											Efisiensi belanja listrik, telepon/ internet/faximili, surat kabar serta sisa kontrak belanja hibah



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN				PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
								Rp	%		
											6 paket pekerjaan MCK di Desa Tanjungan Kec . Cikeusik, Kabupaten Pandeglang tidak dilaksanakan karena mobilisasi material terkendala lokasi/ akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan (musim hujan) dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
	13		Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	7,006,817,750.00	2.55	100.00	100.00	6,641,413,050.00	94.79	365,404,700.00	5.21 Efisiensi belanja makanan dan minuman kegiatan
											Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terkait pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta denda keterlambatan pekerjaan 5 hari untuk pekerjaan Pembangunan Kolam Retensi/ Retardasi bangunan Pelengkap Lainnya.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
							Rp	%			
14		Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan	11,832,670,000.00	4.30	100.00	100.00	11,570,940,000.00	97.79	261,730,000.00	2.21	Efisiensi belanja makanan dan minuman kegiatan dan sisa kontrak
15		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten	7,644,859,375.00	2.78	100.00	100.00	7,349,532,504.00	96.14	295,326,871.00	3.86	Efisiensi belanja listrik, pengadaan dan sisa kontrak
16		Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	13,608,341,180.00	4.95	100.00	98.00	12,721,816,822.00	93.49	886,524,358.00	6.51	Efisiensi belanja penggandaan, promosi dan publikasi, honorarium pokja



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN					PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN	
									Rp	%				
													Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terkait beberapa pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi untuk paket interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II), Pembangunan Plaza Aspirasi dan Landspace Gedung Dinas SDA an Permukiman Provinsi Banten (denda keterlambatan pekerjaan 10).	
													Penambahan Gedung Ruang Arsip yang tidak dilaksanakan karena bukan tidak sesuai tupoksi (Tupoksi UPT KP3B)	
	17		Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan			47,665,745,668.00	17.34	100.00	97.38	43,423,252,996.00	91.10	4,242,492,672.00	8.90	Efisiensi belanja penggandaan, promosi dan publikasi, honorarium pokja dan belanja listrik



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN					PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
									Rp	%		
												Efisiensi hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi untuk paket Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II), Pembangunan Gedung Kantor dan Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II) dan Landscape Gedung Padepokan Silat



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN					PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
									Rp	%		
												Putus kontrak untuk paket pekerjaan Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dengan progres fisik 92,94 % karena ada pekerjaan belum selesai (pengecatan dan dincing ACP pos jaga) dan Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II) dengan progres fisik 97,28 % karena ada pekerjaan yang belum selesai (pengecatan dan pemasangan dimding ACP pada drop off)
												Terdapat efisiensi / sisa anggaran untuk paket pengadaan alat(tidak boleh dilaksanakan sesuai arahan peneliti)



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
							Rp	%			
18		Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakyaan lainnya	3,664,419,400.00	1.33	100.00	97.19	3,104,245,000.00	84.71	560,174,400.00	15.29	Efisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 7 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
											Forum Konsultasi Publik Review Masterplan Pembangunan TPST Bojong Menteng yang tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
19		Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	3,672,291,500.00	1.34	100.00	100.00	3,052,357,600.00	83.12	619,933,900.00	16.88	Efisiensi belanja pendukung untuk Rapat Koordinasi Kegiatan DED Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di 8 Kabupaten/Kota



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN					PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN	
									Rp	%				
													Efisiensi hasil pemeriksaanBPK terhadap 6 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak	
	20		Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman			1,195,085,500.00	0.43	100.00	100.00	990,085,500.00	82.85	205,000,000.00	17.15	Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 2 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
	21		Penatagunaan Kawasan Permukiman			1,177,148,000.00	0.43	100.00	100.00	1,005,190,000.00	85.39	171,958,000.00	14.61	Efisiensi honorarium panitia pelaksana kegiatan, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, pengadaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN					PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN	
									Rp	%				
												Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 2 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak		
	22		Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman			2,231,250,000.00	0.81	100.00	100.00	2,001,156,000.00	89.69	230,094,000.00	10.31	
	23		Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan(Pembayaran Kewajiban TA. 2016)			4,512,466,260.00	1.64	100.00	100.00	3,889,878,020.00	86.20	622,588,240.00	13.80	
	24		Pembangunan Gedung Kantor KP3B (Pembayaran Kewajiban TA. 2016)			984,272,153.00	0.36	100.00	100.00	780,269,153.00	79.27	204,003,000.00	20.73	
	IV	Pembinaan dan Penataan Perumahan				32,765,406,000.00	11.92			10,148,239,600.00	30.97	22,617,166,400.00	69.03	
	25		Pembinaan dan Penataan Perumahan			4,916,151,000.00	1.79	100.00	97.97	4,784,035,000.00	97.31	132,116,000.00	2.69	Efisiensi perlengkapan peserta, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, dokumentasi, promosi dan publikasi, pengadaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN					PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
									Rp	%			
													2 unit RTLH dikota serang/ kasemen tidak dilaksanakan karena yang bersangkutan (penerima bantuan) tidak menyetujui pelaksanaan pekerjaan tersebut
	26			Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	1,799,255,000.00	0.65	100.00	100.00	1,660,578,000.00	92.29	138,677,000.00	7.71	Efisiensi belanja jasa tenaga ahli
													Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 3 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
	27			Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	950,000,000.00	0.35	100.00	100.00	866,874,600.00	91.25	83,125,400.00	8.75	Efisiensi belanja penggadaan, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, honorarium pejabat/ pokja pengadaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN			PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		KETERANGAN
							Rp	%			
28		Penatagunaan Pengembangan Perumahan	2,700,000,000.00	0.98	100.00	92.63	2,380,802,000.00	88.18	319,198,000.00	11.82	Efisiensi belanja pengadaan, sewa ruang rapat/ tempat pertemuan, makanan dan minuman kegiatan, jasa narasumber
											Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 3 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
											Terdapat 1 paket pekerjaan penyusunan naskah Akademis RAPERDA Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
29		Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	22,400,000,000.00	8.15	100.00	2.05	455,950,000.00	2.04	21,944,050,000.00	97.96	Pengadaan lahan yang tidak dilakanakan karena terkendala waktu pelaksanaan



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

PROGRAM DAN KEGIATAN				PAGU ANGGARAN DPA(Rp)	BOBOT	RENCANA	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN	KETERANGAN
								Rp	%		
											pekerjaan yang tidak mencukupi
V			Penyediaan Data Pembangunan Daerah	525,000,000.00	0.19			523,825,000.00	99.78	1,175,000.00	0.22
	30		Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	525,000,000.00	0.19	100.00	100.00	523,825,000.00	99.78	1,175,000.00	0.22
			JUMLAH	274,905,604,638.00	100.00	100.00	63.24	161,859,987,538.00	58.88	113,045,617,100.00	41.12

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4.1 Akuntabilitas Keuangan Sasaran/Program Strategi

Realisasi keuangan tiap sasaran/program strategis masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Realisasi Keuangan per Sasaran/Program Strategis

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1	Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	165,990,000	141,909,000	85.49
		2	Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,100,908,100	1,050,082,700	95.38
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	1	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	98,608,145,127	20,508,998,248	20.80
		2	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	5,417,644,625	4,924,427,261	90.90
		3	Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	429,997,200	165,864,000	38.57
		4	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	3,100,000,000	2,060,966,902	66.48

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				(Rp.)	(Rp.)	(%)
3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	1	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	16,693,964,550	15,315,544,188	91.74
		2	Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman desa/kel (lokasi)	16,682,109,500	15,537,719,800	93.14
		3	Penyelesaian Gedung KP3B	22,237,472,708	20,851,618,479	93.77
		4	Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	59,268,966,828	53,408,617,516	90.11
4	Pembinaan dan Penataan Perumahan	1	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	32,765,406,000	10,148,194,600	30.97
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	525,000,000	523,825,000	99.78
JUMLAH ANGGARAN				256,995,604,638	144,729,256,394	56.32

Realisasi Belanja Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati Bersama, secara keseluruhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun anggaran 2017 menganggarkan dana kegiatan sebesar **Rp.274.905.604.638,00** (Dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.17.910.000.000,00** (Tujuh belas milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan
2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 256.995.604.638,00** (Dua ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).

Dalam pelaksanaannya sampai dengan Desember 2017, alokasi belanja tersebut terserap sebesar **Rp. 161.959.987.538,00** (Seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan

puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) atau mencapai **58.88%**. dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.17.130.731.144,00** (Tujuh belas milyar serratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu serratus empat puluh empat rupiah) atau **95.65%**.
2. Belanja Langsung sebesar **Rp. 144,729,256,394,00** (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau **56.32%**.

Adapun rincian lebih lanjut anggaran dan realisasinya dapat dilihat di tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Sasaran/Program Strategis

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi	
				(Rp)	(Rp)	(%)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	165,990,000	141,909,000	85.49
			Jumlah	165,990,000	141,909,000	85.49
		2 Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1,100,908,100	1,050,082,700	95.38
			Jumlah	1,100,908,100	1,050,082,700	95.38
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	1 Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3,125,100,000	2,835,730,450	90.74
			Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	93,233,045,127	15,827,470,898	16.98
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1,750,000,000	1,392,982,300	79.60
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	29,000,000	4,740,000	16.34
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	471,000,000	448,074,600	95.13



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

N o	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Realisasi	
					(Rp)	(Rp)	(%)
				Jumlah	98,608,145,127	20,508,998,248.00	20.80
		2	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4,917,644,625	4,497,714,261	91.46
				Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	500,000,000	426,713,000	85.34
				Jumlah	5,417,644,625	4,924,427,261	90.90
		3	Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Kapasitas Aparatur	429,997,200	165,864,000	38.57
				Jumlah	429,997,200	165,864,000	38.57
		4	Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	3,100,000,000	2,060,966,902	66.48
				Jumlah	3,100,000,000	2,060,966,902	66.48
3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	1	Tingkat ketersediaa n air bersih dan sanitasi (M3)	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	9,687,146,800	8,674,131,138	89.54
				Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	7,006,817,750	6,641,413,050	94.79
				Jumlah	16,693,964,550	15,315,544,188	91.74



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

N o	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Realisasi		
					(Rp)	(Rp)	(%)	
		2	Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/ kel (lokasi)	Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan		11,832,670,000	11,570,940,000	97.79
				Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman		3,672,291,500	2,961,589,800	80.65
				Penatagunaan Kawasan Permukiman		1,177,148,000	1,005,190,000	85.39
					Jumlah	16,682,109,500	15,537,719,800	93.14
		3	Penyelesaian Gedung KP3B	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten		7,644,859,375	7,349,532,504	96.14
				Pembangunan Gedung Kantor di KP3B		13,608,341,180	12,721,816,822	93.49
				Pembangunan Gedung kantor KP3B (Pembayaran Kewajiban TA. 2016)		984,272,153	780,269,153	79.27
					Jumlah	22,237,472,708	20,851,618,479	93.77
		4	Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan		47,665,745,668	43,423,252,996	91.10
				Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaannya Lainnya		3,664,419,400	3,104,245,000	84.71
				Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman		2,231,250,000	2,001,156,000	89.69
				Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		1,195,085,500	990,085,500	82.85
				Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan (Pembayaran Kewajiban TA. 2016)		4,512,466,260	3,889,878,020	86.20
					Jumlah	59,268,966,828	53,408,617,516	90.11
4	Pembinaan dan Penataan Perumahan	1	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan		1,799,255,000	1,660,578,000	92.29
				Pembinaan dan Penataan Perumahan		4,916,151,000	4,784,035,000	97.31
				Penatagunaan Pengembangan Perumahan		2,700,000,000	2,380,802,000	88.18

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan dan Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Realisasi	
				(Rp)	(Rp)	(%)
			Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	950,000,000	866,874,600	91.25
			Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	22,400,000,000	455,905,000	2.04
			Jumlah	32,765,406,000	10,148,194,600	30.97
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1 Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	525,000,000	523,825,000	99.78
			Jumlah	525,000,000	523,825,000	99.78
JUMLAH ANGGARAN				256,995,604,638	144,637,767,694	56.28

3.4.2 Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017 sebesar Rp. 161.859.987.538.00 atau 58.88 % dari anggaran sebesar Rp. 274.905.604.638,00 terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 17.130.731.144,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 17.910.000.000,00 dan Realisasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 144.729.256.394,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 256.995.604.638,00

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hanya belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tambahan penghasilan. Realisasi Belanja pegawai TA 2017 adalah sebesar Rp. 17.130.731.144,00 atau 95,65% dari anggaran sebesar Rp. 17.910.000.000,00 terdiri dari Gaji dan Tunjangan realisasi sebesar Rp. 6.614.689.506,00 dari anggaran Rp. 7.014.667.500,00, dan Realisasi Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 10.516.041.638,00 dari anggaran sebesar Rp. 10.895.332.500,00 .

B. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Jenis Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Honorarium/Upah rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Realisasi belanja pegawai T.A 2017 sebesar Rp. 1.552.030.000,00 atau 91,36% dari anggaran sebesar Rp. 1.698.730.000,00 terdiri dari ;

- a. Honor PNS Realisasi belanja pegawai T.A 2017 sebesar Rp. 515.530.000,00 atau 77,92% dari anggaran sebesar Rp. 661.630.000,00
- b. Honor Non PNS Realisasi belanja pegawai T.A 2017 sebesar Rp. 1.036.500.000,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp. 1.037.100.000,00

2 Belanja barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp. 63.475.028.122,00 atau 89,41% dari anggaran sebesar Rp. 70.996.636.310,00 terdiri dari;

- a. Belanja Bahan Pakai Habis Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.112.048.200,00 atau 88,06 % dari anggaran sebesar Rp. 1.262.828.925,00
- b. Belanja Bahan/Material Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 5.290.000,00 atau 53,42% dari anggaran sebesar Rp. 9.902.000,00
- c. Belanja Jasa Kantor Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 3.530.126.743,00 atau 84,35 % dari anggaran sebesar Rp. 4.185.273.400,00
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.116.207.300,00 atau 78,86% dari

anggaran sebesar Rp. 1.415.498.000,00

- e. Belanja Cetak dan Penggandaan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.318.436.627,00 atau 94,59% dari anggaran sebesar Rp. 1.393.892.700,00
- f. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.111.455.000,00 atau 75,48% dari anggaran sebesar Rp. 1.472.590.000,00
- g. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 28.068.000,00 atau 72,8 % dari anggaran sebesar Rp. 38.555.200,00
- h. Belanja Makan dan Minuman Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.188.238.000,00 atau 80,8% dari anggaran sebesar Rp. 1.470.524.000,00
- i. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 93.568.000,00 atau 95,56% dari anggaran sebesar Rp. 97.920.000,00
- j. Belanja Pakaian Kerja Lapangan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 11.460.000,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp. 12.200.000,00
- k. Belanja Perjalanan Dinas Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 2.060.966.902,00 atau 66,48% dari anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000,00
- l. Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00
- m. Belanja Pemeliharaan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 4.947.151.550,00, atau 98,51% dari anggaran sebesar Rp. 5.021.886.025,00
- n. Belanja Jasa Konsultansi Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 13.136.591.900,00 atau 87,02% dari anggaran sebesar Rp. 15.096.364.000,00
- o. Belanja Hibah Barang/Jasa kepada masyarakat/pihak ketiga Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 23.047.803.000,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp. 24.418.133.000,00
- p. Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 4.681.275.000,00 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp. 4.781.200.000,00

- q. Belanja Uang Saku dan Uang Makan belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 724.050.000,00 atau 90,64% dari anggaran sebesar Rp. 798.800.000,00
- r. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 2.313.607.000,00 atau 83,35% dari anggaran sebesar Rp. 2.775.650.000,00
- s. Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 322.800.000,00 atau 98,9% dari anggaran sebesar Rp. 326.400.000,00
- t. Belanja Jasa Kegiatan Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 237.500.000,00 atau 99,37% dari anggaran sebesar Rp. 239.000.000,00
- u. Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 1.849.409.900,00 atau 80,18% dari anggaran sebesar Rp. 2.306.619.060,00
- v. Belanja Barang Non Kapitalisasi Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 sebesar Rp. 638.975.000,00 atau 90,84% dari anggaran sebesar Rp. 703.400.000,00

3 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2017 Sebesar Rp. 79.702.198.272,00 atau 43,25% dari anggaran sebesar Rp. 184.300.238.328,00 terdiri dari;

- a. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Realisasi belanja T.A 2017 sebesar Rp. 1.509.403.000,00 atau 1,94% dari anggaran sebesar Rp. 77.944.193.000,00
- b. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan bukan Gedung

Realisasi belanja T.A 2017 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp. 21.715.000.000,00

- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat-alat Bantu Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 3.135.220.000,00 atau 89,86% dari anggaran sebesar Rp. 3.489.000.000,00,-
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 9.682.264.671,00 atau 96,23% dari anggaran sebesar Rp. 275.552.400,-
- e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 36.100.000,00 atau 13,10% dari anggaran sebesar Rp. 275.552.400,00,-
- f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Kantor Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 438.478.800,00 atau 80,67% dari anggaran sebesar Rp. 543.550.000,00,-
- g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 707.734.038,00 atau 87,41% dari anggaran sebesar Rp. 809.700.000,00,-
- h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 956.158.200,00 atau 98,15% dari anggaran sebesar Rp. 974.193.200,00
- i. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Realisasi belanja barang dan jasa T.A 2017 Rp. 56.601.762,00 atau 98,98% dari anggaran sebesar Rp. 57.184.550,00
- j. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 494.501.650,00 atau 98,75% dari anggaran sebesar Rp. 500.778.377,00
- k. Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Komunikasi Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 9.834.000,00 atau 81,95% dari anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 99.100.000,00 atau 99,1% dari anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00
- m. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Realisasi belanja T.A 2017 Rp. 32.204.062.141,00 atau 89,63% dari anggaran sebesar Rp. 35.928.838.311,00

- n. Belanja Modal Gedung dan Banguna Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 27.066.850.610,00
- o. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 197.892.000,00 atau 98,16% dari anggaran sebesar Rp. 201.600.000,00
- p. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 224.5350.000,00 atau 89,62% dari anggaran sebesar Rp. 2.505.400.000,00
- q. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 118.100.000,00 atau 98,42% dari anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00
- r. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi Realisasi belanja TA. 2017 sebesar Rp. 744.547.400,00 atau 99,27% dari anggaran sebesar Rp. 750.000.000,00

Tabel 3.16 Realisasi Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
BELANJA	274.905.604.638,00	161.859.987.538,00	58,88	113.045.617.100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.910.000.000,00	17.130.731.144,00	95,65	779.268.856,00
Belanja Pegawai	17.910.000.000,00	17.130.731.144,00	95,65	779.268.856,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.014.667.500,00	6.614.689.506,00	94,30	399.977.994,00
Tambahan Penghasilan PNS	10.895.332.500,00	10.516.041.638,00	96,52	379.290.862,00
BELANJA LANGSUNG	256.995.604.638,00	144.729.256.394,00	56,32	112.266.348.244,00
Belanja Pegawai	1.698.730.000,00	1.552.030.000,00	91,36	146.700.000,00
Honorarium PNS	661.630.000,00	515.530.000,00	77,92	146.100.000,00
Honorarium Non PNS	1.037.100.000,00	1.036.500.000,00	99,94	600.000,00



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Belanja Barang dan Jasa	70.996.636.310,00	63.475.028.122,00	89,41	7.521.608.188,00
Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.828.925,00	1.112.048.200,00	88,06	150.780.725,00
Belanja Bahan/Material	9.902.000,00	5.290.000,00	53,42	4.612.000,00
Belanja Jasa Kantor	4.185.273.400,00	3.530.126.743,00	84,35	655.146.657,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.415.498.000,00	1.116.207.300,00	78,86	299.290.700,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.393.892.700,00	1.318.436.627,00	94,59	75.456.073,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	1.472.590.000,00	1.111.455.000,00	75,48	361.135.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.555.200,00	28.068.000,00	72,80	10.487.200,00
Belanja Makanan dan Minuman	1.470.524.000,00	1.188.238.000,00	80,80	282.286.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	97.920.000,00	93.568.000,00	95,56	4.352.000,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.200.000,00	11.460.000,00	93,93	740.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000.000,00	2.060.966.902,00	66,48	1.039.033.098,00
Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Belanja Pemeliharaan	5.021.886.025,00	4.947.151.550,00	98,51	74.734.475,00
Belanja Jasa Konsultansi	15.096.364.000,00	13.136.591.900,00	87,02	1.959.772.100,00
Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.418.133.000,00	23.047.803.000,00	94,39	1.370.330.000,00
Belanja Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.781.200.000,00	4.681.275.000,00	97,91	99.925.000,00
Uang Saku dan Uang Makan	798.800.000,00	724.050.000,00	90,64	74.750.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	2.775.650.000,00	2.313.607.000,00	83,35	462.043.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	326.400.000,00	322.800.000,00	98,90	3.600.000,00
Belanja Jasa Kegiatan	239.000.000,00	237.500.000,00	99,37	1.500.000,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	2.306.619.060,00	1.849.409.900,00	80,18	457.209.160,00
Belanja Barang Non Kapitalisasi	703.400.000,00	638.975.000,00	90,84	64.425.000,00

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Belanja Modal	184.300.238.328,00	79.702.198.272,00	43,25	104.598.040.056,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	77.944.193.000,00	1.509.403.000,00	1,94	76.434.790.000,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	21.715.000.000,00	0,00	0,00	21.715.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	3.489.000.000,00	3.135.220.000,00	89,86	353.780.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	10.062.000.000,00	9.682.264.671,00	96,23	379.735.329,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	275.552.400,00	36.100.000,00	13,10	239.452.400,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Kantor	543.550.000,00	438.478.800,00	80,67	105.071.200,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	809.700.000,00	707.734.038,00	87,41	101.965.962,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	974.193.200,00	956.158.200,00	98,15	18.035.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	57.184.550,00	56.601.762,00	98,98	582.788,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	500.778.377,00	494.501.650,00	98,75	6.276.727,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	12.000.000,00	9.834.000,00	81,95	2.166.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	100.000.000,00	99.100.000,00	99,10	900.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.928.838.311,00	32.204.062.141,00	89,63	3.724.776.170,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	28.311.248.490,00	27.066.850.610,00	95,60	1.244.397.880,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	201.600.000,00	197.892.000,00	98,16	3.708.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.505.400.000,00	2.245.350.000,00	89,62	260.050.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	120.000.000,00	118.100.000,00	98,42	1.900.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	750.000.000,00	744.547.400,00	99,27	5.452.600,00

3.4.3 Sisa Anggaran (SILPA)

Jumlah anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adakah sebesar **Rp. 274.905.604.638,00** (*Dua ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*) sedangkan yang terserap adalah sebesar **Rp.161.859.987.538,00** (*seratus enam puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*) atau **58.88%** dari pagu anggaran.

Adapun jumlah anggaran yang tidak terserap (SILPA) tahun anggaran 2017 adalah sebesar **Rp.113.045.617.100,00** (*Seratus tiga belas milyar empat puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu seratus rupiah*) atau **41.12%** dari pagu anggaran.

Rekapitulasi sisa anggaran (SILPA) dan Permasalahan Program Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ditampilkan dalam table berikut ini :

Tabel 3.17 Permasalahan Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

NO	PERMASALAHAN /KEGIATAN		SATUAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
1	BATAL LELANG/ BATAL DILAKSANAKAN		14	paket	1,793,762,400	1.59%	
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1	paket	69,360,000	0.06%	
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1	paket	69,360,000		Tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	3	Paket	253,460,000	0.22%	
	1	Instalasi Genset SKPD Terpadu	1	Paket	155,198,000		Pengadaan instalasi genset dan tangki solar gedung SKPD terpadu yang

NO	PERMASALAHAN/KEGIATAN		SATUAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN	
		2	Pengadaan Tangki Solar Genset Gedung SKPD Terpadu	1	paket	82,662,000		tidak dilaksanakan karena Terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (± 2 bulan), Instalasi bisa dilaksanakan setelah pengadaan genset tersedia, dimana dalam pelaksanaannya keterlambatan pengiriman genset
		3	Konsultan Pengawasan Pemagararan Masjid Pengganti	1	Paket	15,600,000		Pekerjaan pemagaran masjid dan Konsultan Pengawasan sanakan karena pembelian tanah untuk masjid baru selesai dibayarkan/ dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017 sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi
	3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih		6	paket	900,000,000	0.80%	Tidak dilaksanakan karena mobilisasi material terkendala lokasi/ akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan (musim hujan) dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.
		Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis		6	paket	900,000,000		
		1	Kp. Sukamanah Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Kab.Pandeglang	1	paket	150,000,000		
		2	Kp. Kertasari 1 Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Kab.Pandeglang	1	paket	150,000,000		
		3	Kp. Cigebang Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Kab.Pandeglang	1	paket	150,000,000		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	PERMASALAHAN/KEGIATAN		SATUAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
	4	Kp. Malangnengah Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Kab.Pandeglang	1	paket	150,000,000		
	5	Kp. Cideimah Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Kab.Pandeglang	1	paket	150,000,000		
	6	Kp. Telanca Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Kab.Pandeglang	1	paket	150,000,000		
4	Pembangunan Gedung Kantor di KP3B		1	paket	272,147,400	0.24%	
	1	Penambahan Ruang Gudang Arsip	1	paket	272,147,400		Penambahan Gedung Ruang Arsip yang tidak dilaksanakan karena bukan tidak sesuai tupoksi (Tupoksi UPT KP3B)
5	Pembinaan dan Penataan Perumahan		2	paket	99,925,000	0.09%	
	1	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang	2	paket	99,925,000		2 unit RTLH dikota serang/ kasemen tidak dilaksanakan karena yang bersangkutan tidak menyetujui
6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan		1	paket	198,870,000	0.18%	
	1	Penyusunan naskah Akademis RAPERDA Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	paket	198,870,000		karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
2	BATAL PENGADAAN LAHAN		6.039	Ha	97,852,444,000	86.56%	
	1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	4.6	Ha	21,942,750,000	19.41%	Pengadaan lahan yang tidak dilaskanakan karena terkendala waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	PERMASALAHAN/KEGIATAN		SATUAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
	1	Pengadaan Lahan Banten Lama	4.6	Ha	21,942,750,000		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B		14,390	m2	75,909,694,000	67.15%	
	1	Pembebasan Lahan KP3B	14,390	m2	75,849,390,000		Pengadaan lahan KP3B seluas 14.390 m2 dan konsulan apraisal yang tidak dilaksanakan karena penganggaran pada APBD-P sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
	2	Konsultan Appraisal Pengembangan Lahan KP3B	1	Paket	60,304,000		
3	BATAL KONTRAK		1	paket	170,662,000	0.15%	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B		1	paket	170,662,000	0.15%	
	1	Pengadaan Motor Opsional Lapangan Kp3B	1	paket	170,662,000		pihak penyedia membatalkan kontrak karena unit tidak tersedia.
4	PUTUS KONTRAK		2	paket	1,008,234,844	0.89%	
1	Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan		2	paket	1,008,234,844	0.89%	
	1	Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten	1	paket	297,645,292		Putus kontrak untuk paket pekerjaan Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dengan progres fisik 92,94 % karena ada pekerjaan belum selesai (pengecatan dan dincing ACP pos jaga)



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	PERMASALAHAN/KEGIATAN	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
	2 Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II)	1 paket	710,589,552		Putus kontrak untuk paket pekerjaan Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II) dengan progres fisik 97,28 % karena ada pekerjaan yang belum selesai (pengecatan dan pemasangan dimding ACP pada drop off)
5	SISA KONTRAK	272 paket	3,498,654,652	3.09%	
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2 paket	1,350,000		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	20 paket	219,174,550		
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2 paket	30,062,000		
4	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2 paket	76,345,525		
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B	5 paket	20,325,000		
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B	30 paket	482,716,056		
7	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	60 paket	84,281,800		
8	Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	25 paket	344,733,146		
9	Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan	71 paket	259,600,000		
10	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten	26 paket	61,436,675		
11	Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	3 paket	1,342,484,000		
12	Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakyaan lainnya	8 paket	12,455,000		
13	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	6 paket	269,675,900		
14	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1 paket	200,000		



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	PERMASALAHAN/KEGIATAN	SATUAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
15	Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	3	paket	230,094,000		
16	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	1	paket	2,277,000		
17	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	2	paket	15,014,000		
18	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	2	paket	44,055,000		
19	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1	paket	1,300,000		
20	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	2	paket	1,075,000		
6	EFISIENSI HASIL PEMERIKSAAN BPK	29	Paket	2,066,551,207	1.83%	
1	Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	1	Paket	15,037,554		Efisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan denda keterlambat 5 hari
2	Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	3	Paket	393,912,735		Efisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan denda keterlambat 10 hari
3	Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	3	Paket	719,752,418		Efisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi
4	Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciptakyaan lainnya	7	Paket	435,720,000		fisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	PERMASALAHAN/KEGIATAN	SATUAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
						yang dituangkan dalam kontrak
5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	6	Paket	211,700,500		fisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
6	Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	2	Paket	194,500,000		fisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
7	Penatagunaan Kawasan Permukiman	2	Paket	13,400,000		fisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	3	Paket	54,400,000		fisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
9	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	2	Paket	28,128,000		fisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

NO	PERMASALAHAN/KEGIATAN		SATUAN		PAGU ANGGARAN (Rp)	%	KETERANGAN
7	SISA BTL DAN EFISIENSI				6,655,307,997	5.89%	
	1	Belanja Tidak Langsung	1	ls	779,268,856		Sisa Gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, belanja iuran BPJS, tunjangan umum, tunjangan khusus, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, biaya insentif retribusi daerah
	2	Sisa Belanja penunjang (Honorarium, ATK, pengadaan, Cetak, Perjalanan dinas dalam an luar daerah, makanan dan minuman kegiatan, Dokumentasi dll)	1	ls	5,876,039,141		
	JUMLAH				113,045,617,100		



Tabel 3.18 Rekapitulasi Sisa Anggaran (SILPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
A	Belanja Tidak langsung		17,910,000,000.00	779,268,856.00	0.00	779,268,856.00	
	1	Gaji dan Tunjangan	17,910,000,000.00	779,268,856.00	0.00	779,268,856.00	Efisiensi berdasarkan potongan Tambahan Penghasilan Beban Kerja sesuai dengan nilai SKP
B	Belanja Langsung						
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		165,990,000.00	24,081,000.00	0.00	24,081,000.00	Efisiensi belanja tenaga ahli
	1	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	80,851,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	
	2	Penyusunan Buku/Himpunan SPP,SPM dan Sp2D Semeseteran Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Prov.Banten	2,260,000.00	0.00		0.00	
	3	Konsultasi Sistem Gaji Taspen dengan Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman	1,400,000.00	0.00		0.00	
	4	Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan Pengembalian Belanja Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman	1,700,000.00	0.00		0.00	
	5	Penyusuna Data Prognosis TA.2017 Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Prov.Banten	250,000.00	0.00		0.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	6	Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Ta.2017	7,000,000.00	0.00		0.00	
	7	Rekonsiliasi Data Aset APBD TA.2017	319,000.00	0.00		0.00	
	8	Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Provinsi Banten	11,750,000.00	0.00		0.00	
	9	Penyusunan Rencana Kerja Sub Bagian Keuangan Dinas PKP	37,350,000.00	80,500.00		80,500.00	
	10	Pelaporan Pengelolaan Arsip Dinas PKP Prov.Banten	22,060,000.00	500.00		500.00	
	11	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	1,050,000.00	0.00		0.00	
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1,100,908,100.00	49,475,400.00	1,350,000.00	50,825,400.00	Efisiensi penggandaan, belanja sewa tempat, ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, belanja perlengkapan peserta, sisa kontrak
	1	Penyusunan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman Tahun 2016	17,350,000.00	0.00		0.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
2	Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2016	3,800,000.00	0.00		0.00	
3	Penyusunan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman TA. 2016	2,950,000.00	0.00		0.00	
4	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	21,780,000.00	0.00		0.00	
5	Penyusunan Laporan Analisa, Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan APBD dan APBN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	29,950,000.00	0.00		0.00	
6	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	2,900,000.00	0.00		0.00	
7	Forum Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017- 2023	137,964,500.00	1,460,000.00		1,460,000.00	
8	Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (FSKPD) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman se- Provinsi Banten Tahun 2017	227,808,700.00	32,400.00		32,400.00	
9	Penyusunan RKA-P /DPPA APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	18,964,000.00	224,000.00		224,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
10	Rakor Capaian Kinerja Bidang Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2018	27,546,500.00	0.00		0.00	
11	Penyusunan RKA /DPA APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2018	18,864,000.00	224,000.00		224,000.00	
12	Monitoring Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber Dana APBD TA. 2017	19,195,300.00	0.00		0.00	
13	Workshop Penyusunan DRPK Tahun 2018	20,993,300.00	0.00		0.00	
14	Penyusunan Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018	24,650,000.00	0.00		0.00	
15	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pedoman Pelaksanaan Pembangunan TA. 2017 dan Pedoman Penyusunan RKA TA. 2018	51,061,300.00	0.00		0.00	
16	Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa (RUP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber dana APBD Provinsi Banten TA. 2017	1,700,000.00	0.00		0.00	
17	Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumber Dana APBD Provinsi Banten TA. 2017	2,600,000.00	0.00		0.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
18	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017	1,900,000.00	0.00		0.00	
19	Penyusunan Peraturan Gubernur Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017	3,500,000.00	0.00		0.00	
20	Penyusunan Updating Katalog Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2008-2017	51,875,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	
21	Penyusunan Rencana kerja Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan	390,000.00	0.00		0.00	
22	Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017	84,298,100.00	1,620,000.00		1,620,000.00	
23	Penyusunan Data Base Kajian Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2017	76,875,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	
24	Sosialisasi Penyelenggaraan Hibah/Bansos Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA.2017	56,264,100.00	14,130,000.00		14,130,000.00	
25	Rapat Koordinasi Keterpaduan Penyelenggaraan Program dan Anggaran Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	117,859,500.00	15,630,000.00		15,630,000.00	
26	Bimbingan Teknis Penyusunan Kontrak/E-Kontrak	77,868,800.00	16,155,000.00		16,155,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		3,125,100,000.00	70,195,000.00	219,174,550.00	289,369,550.00	Efisiensi penggandaan, sisa kontrak dan Pengadaan Plang nama Dinas Elektrik yang tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi
	1	Pengadaan GPS	39,650,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
	2	Pengadaan Peralatan Studio Visual	97,707,250.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
	3	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	26,575,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
	4	Pengadaan Personal Komputer	389,748,200.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	
	5	Penyusunan RKBMD Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PKP TA. 2018	550,000.00	0.00	0.00	0.00	
	6	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas PKP TA. 2017	1,225,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
	7	Penataan Ruang Kepala Dinas	202,650,000.00	0.00	25,665,049.00	25,665,049.00	
	8	Peningkatan Ruang Sekretaris Dinas	202,650,000.00	0.00	31,134,841.00	31,134,841.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
9	Kelengkapan Ruang Rapat Dinas	202,650,000.00	0.00	34,632,387.00	34,632,387.00	
10	Pengadaan Barang Jasa Vertikal Blind	176,150,000.00	0.00	1,331,885.00	1,331,885.00	
11	Pengadaan Barang Jasa Kaca Film	200,650,000.00	10,000.00	27,179,800.00	27,189,800.00	
12	Pengadaan Barang Jasa Peralatan Komputer	34,850,000.00	60,000.00	347,000.00	407,000.00	
13	Pengadaan Barang Jasa Mesin Pel, Mesin Genset	147,850,000.00	60,000.00	20,513,900.00	20,573,900.00	
14	Pengadaan Projector, Infocur Projector, Televisi LCD, Printer Scanner A3, Pesawat Telepon	148,710,000.00	60,000.00	2,681,600.00	2,741,600.00	
15	Pengadaan Printer A3 Warna, Printer laserjet A3, Printer Epson L 120	164,850,000.00	60,000.00	10,110,000.00	10,170,000.00	
16	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	163,650,000.00	60,000.00	8,300,000.00	8,360,000.00	
17	Pengadaan Mesin PABx	62,650,000.00	60,000.00	7,639,000.00	7,699,000.00	
18	Pengadaan PC All In one	152,650,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
19	Pengadaan Kursi Stainless	55,650,000.00	60,000.00	2,358,000.00	2,418,000.00	
20	Pengadaan Audio Room	68,900,000.00	60,000.00	13,998,300.00	14,058,300.00	
21	Pengadaan Camera Digital; Camera XLR, Camera Gopro, Kunci Pintu Otomatis Finger Print dan Kartu	189,650,000.00	60,000.00	500,000.00	560,000.00	
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	70,650,000.00	69,360,000.00	0.00	69,360,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	23	Pengadaan CCTV, Hardisk Eksternal, Digital Pocket Cam dan Safety Ware	60,950,000.00	60,000.00	3,610,000.00	3,670,000.00	
	24	Pengadaan Meja Eselon 2 dan 3; Pengadaan Kursi Pejabat	31,934,550.00	60,000.00	582,788.00	642,788.00	
	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantin dan Front Office	202,650,000.00	60,000.00	21,009,000.00	21,069,000.00	
	26	Pengadaan Barang Jaringan Server Internet	29,300,000.00	0.00	281,000.00	281,000.00	
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		1,750,000,000.00	326,955,700.00	30,062,000.00	357,017,700.00	Efisiensi belanja jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/ gas, pajak kendaraan bermotor, pemeliharaan peralatan kantor, pemeliharaan komputer/laptop, pemeliharaan alat komunikasi dan sisa kontrak gedung
	1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 3	266,188,000.00	16,119,700.00	0.00	16,119,700.00	
	2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	619,060,000.00	168,621,200.00	0.00	168,621,200.00	
	3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	540,650,000.00	118,449,800.00	0.00	118,449,800.00	
	4	Pemeliharaan Peralatan Kantor	51,400,000.00	15,653,000.00	0.00	15,653,000.00	
	5	Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer	56,500,000.00		20,550,000.00	20,550,000.00	
	6	Pemeliharaan Infocus	8,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
	7	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9,902,000.00	4,612,000.00	0.00	4,612,000.00	
	8	Pemeliharaan Alat Komunikasi	12,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	9	Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	186,300,000.00		9,512,000.00	9,512,000.00	
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		4,917,644,625.00	342,908,939.00	76,345,525.00	419,254,464.00	Efisiensi belanja tenaga ahli, sewa tempat, belanja listrik, telepon, faximili, surat kabar, jasa kebersihan, promosi dan publikasi, makanan dan minuman kegiatan, extra fooding, narasumber, sewa tenda, dekorasi dan sisa kontrak ATK dan pengadaan pakaian korpri.
	1	Pameran Display Banten Expo pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	229,350,000.00	23,484,000.00	0.00	23,484,000.00	
	2	Penyedia Barang dan Jasa Perkantoran	3,524,505,025.00	282,640,739.00	76,345,525.00	358,986,264.00	
	3	Publikasi Hasil Pembangunan dan Pemenuhan Iklan Pada Media massa	1,056,000,000.00	20,500,000.00		20,500,000.00	
	4	Peringatan Hari Bhakti PU	105,149,600.00	16,284,200.00		16,284,200.00	
	5	Inventarisasi Barang Milik Negara	2,640,000.00	0.00		0.00	
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur		429,997,200.00	264,133,200.00	0.00	264,133,200.00	Efisiensi belanja sewa tempat/ ruang rapat, jasa narasumber/ tenaga ahli, pengadaan dan biaya pengiriman kursus/ diklat (biaya diklat untuk peserta sudah terfasilitasi
	1	Bimbingan teknis kearsipan	16,422,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	
	2	Workshop Pembangunan dalam Media	134,770,000.00	77,300,000.00	0.00	77,300,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
						dari diklat di Kementerian PUPR)
3	Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	39,160,000.00	19,580,000.00	0.00	19,580,000.00	
4	Bimbingan penyusunan SOP dan SP	16,485,200.00	5,633,200.00	0.00	5,633,200.00	
5	Pembinaan Kepegawaian Aparatur Dinas	26,040,000.00	16,400,000.00	0.00	16,400,000.00	
6	Pembinaan Kepegawaian Non PNS pada Dinas	27,120,000.00	27,120,000.00	0.00	27,120,000.00	
7	Pengiriman Diklat Teknis/ Kursus Singkat/ Pelatihan*) pada Aparatur Dinas	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	
8	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Perumahan	20,000,000.00	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	
9	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Kawasan Permukiman	20,000,000.00	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	
10	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Infrastruktur Permukiman	20,000,000.00	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	
11	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Subbag Umum dan Kepegawaian	20,000,000.00	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	
12	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Subbag PEP dan Keuangan	20,000,000.00	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
7	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah		3,100,000,000.00	1,039,033,098.00	0.00	1,039,033,098.00	Efisiensi belanja SPPD dalam dan Luar Daerah
	1	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	2,104,120,000.00	596,394,067.00		596,394,067.00	
	2	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	995,880,000.00	442,639,031.00		442,639,031.00	
8	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B		500,000,000.00	73,287,000.00	0.00	73,287,000.00	Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat, promosi dan publikasi, surat kabar dan honorarium pokja dan ATK
	1	Penyediaan Belanja Pendukung Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)	162,301,000.00	31,416,000.00	0.00	31,416,000.00	
	2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Pengelolaan KP3B	301,491,000.00	34,051,000.00	0.00	34,051,000.00	
	3	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B	35,029,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	
	4	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	1,179,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B		29,000,000.00	24,260,000.00	0.00	24,260,000.00	Efisiensi honorarium pengadaan barang/jasa, belanja listrik dan pemeliharaan alat komunikasi
	1	Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Pengelolaan KP3B	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	
	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Pengelolaan KP3B	28,790,000.00	24,050,000.00	0.00	24,050,000.00	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT Pengelolaan KP3B		471,000,000.00	2,600,400.00	20,325,000.00	22,925,400.00	Efisiensi honorarium pengadaan barang/jasa dan sisa kontrak pengadaan alat ukur, peralatan kantor, perlengkapan kantor
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	1,504,400.00	400.00	0.00	400.00	
	2	Penadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor	385,895,000.00	2,600,000.00	4,225,000.00	6,825,000.00	
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola KP3B	83,600,600.00	0.00	16,100,000.00	16,100,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B		93,233,045,127.00	76,922,858,173.00	482,716,056.00	77,405,574,229.00	1. Pengadaan instalasi genset dan tangki solar gedung SKPD terpadu yang tidak dilaksanakan karena Terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi (± 2 bulan), Instalasi bisa dilaksanakan setelah pengadaan genset tersedia, dimana dalam pelaksanaannya keterlambatan pengiriman genset 2. Pengadaan motor yang tidak dilaksanakan karena pihak penyedia jasa membatalkan kontrak karena unit motor tidak tersedia. 3. Pengadaan lahan KP3B seluas 14.390 m2 dan konsulan
	1	Pengadaan Genset SKPD Terpadu	3,021,762,000.00	600,173.00	121,560,000.00	122,160,173.00	
	2	Instalasi Genset SKPD Terpadu	155,198,000.00	155,198,000.00	0.00	155,198,000.00	
	3	Pengadaan Tangki Solar Genset Gedung SKPD Terpadu	82,662,000.00	82,662,000.00	0.00	82,662,000.00	
	4	Pengadaan BBM Solar Genset	42,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
	5	Pekerjaan penataan TPST KP3B	155,198,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	
	6	Pengadaan Alat Pendukung Penolahan Sampah TPST KP3B	122,662,000.00	1,362,000.00	1,900,000.00	3,262,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
7	Biaya Penambahan Daya Listrik PLN/ Tambah Daya Pendukung TPST Kp3B	17,500,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	apraisal yang tidak dilaksanakan karena penganggaran pada APBD-P sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
8	Penambahan kabel Suply Gedung SKPD Terpadu	202,662,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	4. Pekerjaan pemagaran masjid dan Konsultan Pengawasan sanakan karena pembelian tanah untuk masjid baru selesai dibayarkan/ dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017 sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi
9	Pengadaan Motor Roda Tiga Sampah Dump Hidrolik pendukung TPST Kp3B	122,662,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	
10	Pengadaan Motor Roda Tiga Sampah pendukung TPST Kp3B	86,662,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	
11	Pengadaan Motor Opsional Lapangan Kp3B	170,662,000.00	170,662,000.00		170,662,000.00	5, Sisa Kontrak
12	Pengadaan Mobil Alat Angkut Sampah Arm rol + Container Tertutup pendukung TPST KP3B	856,862,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
13	Pengadaan Mobil Operasional Lapangan Pick Up	142,662,000.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	
14	Pengadaan Alat Mesin pemotong Rumput Gendong	26,662,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	
15	Pengadaan Alat mesin Gergaji Kayu	12,662,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	



No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
16	Pengadaan Drone camera + Accessories	28,140,000.00	0.00	978,000.00	978,000.00	
17	Pengadaan Alat Ukur meteran Dorong Digital Measuring Wheel	7,662,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
18	Pengadaan Alat pemetaan GPS Camera	11,017,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	
19	Pengadaan Pompa Sedot Air	12,662,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	
20	Pembuatan Canopy Parkir Gedung SKPD Terpadu	205,198,000.00	0.00	1,930,000.00	1,930,000.00	
21	Revitalisasi Taman Jam	205,198,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
22	Revitalisasi Taman Batu Fossil	205,198,000.00	0.00	2,072,600.00	2,072,600.00	
23	Pengadaan Garbage Truck Compactor Kap. 6,5 m3	1,006,862,000.00	0.00	37,512,060.00	37,512,060.00	
24	Pengadaan Garbage Truck Compactor Kap. 10 m3	1,306,862,000.00	0.00	43,703,269.00	43,703,269.00	
25	Instalasi CCTV + Accesories SKPD Terpadu	104,875,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	
26	Pengadaan Tempat Sampah Tutup Roda Dorong	50,162,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
27	DED Workshop UPT KP3B	52,916,000.00	1,600,000.00	300,000.00	1,900,000.00	
28	Konsultan Individu Survey Inventariasi Kebutuhan Sarana Prasarana KP3B	237,304,000.00	0.00	100,800,000.00	100,800,000.00	
29	Pengadaan Mobil Sapu Jalan	6,406,762,000.00	0.00	111,900,000.00	111,900,000.00	
30	Pembebasan Lahan Masjid Kecil KP3B	2,094,803,000.00	585,400,000.00	0.00	585,400,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
31	Pembebasan Lahan KP3B	75,849,390,000.00	75,849,390,000.00	0.00	75,849,390,000.00	
32	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APART) SKPD Terpadu	62,662,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
33	Pengadaan Alat Dokumentasi Lapangan Camera DSLR	21,690,127.00	0.00	420,127.00	420,127.00	
34	Konsultan Pengawas Pekerjaan penataan TPST Kp3B	17,200,000.00	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	
35	Konsultan Pengawas Pekerjaan Revitalisasi Taman Jam	17,200,000.00	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	
36	Konsultan Pengawas Pekerjaan Revitalisasi Taman Fosil	17,200,000.00	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	
37	Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembuatan Canopy Gedung SKPD Terpadu	17,200,000.00	0.00	7,850,000.00	7,850,000.00	
38	Konsultan Pengawasan Pemagaran Masjid Pengganti	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	
39	Konsultan Appraisal Pengembangan Lahan KP3B	60,304,000.00	60,304,000.00	0.00	60,304,000.00	
12	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	9,687,146,800.00	928,733,862.00	84,281,800.00	1,013,015,662.00	1). Efisiensi belanja listrik, telepon/ internet/ faximili, surat kabar serta sisa kontrak belanja hibah
1	Penyusunan Data Base Air Minum	204,300,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
		2 Pemeliharaan Gedung Instalasi Air Bersih 1,2,3,4 KP3B	440,511,200.00	17,216,962.00	499,800.00	17,716,762.00	2). 6 paket pekerjaan MCK di Desa Tanjungan Kec . Cikeusik, Kabupaten Pandeglang tidak dilaksanakan karena mobilisasi material terkendala lokasi/ akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan (musim hujan) dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
		3 Peningkatan Bangunan Instalasi Air Bersih I KP3B	202,600,000.00	0.00	3,708,000.00	3,708,000.00	
		4 Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Strategis	7,218,026,400.00	900,068,900.00	72,128,000.00	972,196,900.00	
		5 Penyediaan Air Bersih Pada Kawasan Banten Lama	1,536,000,000.00	0.00	6,346,000.00	6,346,000.00	
		6 Sosialsasi Pekerjaan Penyediaan Air Bersih di Kawasan Banten Lama	22,297,600.00	0.00	0.00	0.00	
		7 Sosialisasi Pekerjaan Penyediaan Air Bersih Desa margaluyu dan Desa Tanjungan	63,411,600.00	11,448,000.00	0.00	11,448,000.00	
13		Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	7,006,817,750.00	20,671,554.00	344,733,146.00	365,404,700.00	1. Efisiensi belanja makanan dan minuman kegiatan
		1 Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 1 KP3B	166,389,600.00	0.00	209,500.00	209,500.00	2. Efisiensi hasil pemeriksaan BPK



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	2 Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 2 KP3B	166,389,600.00	0.00	224,100.00	224,100.00	terkait pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi serta denda keterlambatan pekerjaan 5 hari untuk pekerjaan Pembangunan Kolam Retensi/ Retardasi bangunan Pelengkap Lainnya.
	3 Pemeliharaan Bangunan Kolam Retardasi/Retensi 3 KP3B	166,389,850.00	0.00	253,100.00	253,100.00	
	4 Penyusunan Data Base Sanitasi	204,300,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	
	5 Pembangunan Kolam Retardasi/Retensi dan Bangunan Pelengkap KP3B Lainnya	2,521,208,200.00	15,037,554.00	245,012,446.00	260,050,000.00	
	6 Pembangunan Drainase Lingkungan Perkotaan pada Kawasan Strategis	1,423,000,000.00	0.00	20,923,000.00	20,923,000.00	
	7 Pembangunan Drainase Lingkungan Pada Kawasan Banten Lama	1,419,707,400.00	0.00	73,465,000.00	73,465,000.00	
	8 Sosialisasi Pekerjaan Pembangunan Drainase Lingkungan	25,433,100.00	5,634,000.00	0.00	5,634,000.00	
	9 Pembangunan Tempat Sampah Pada Kawasan Strategis dan Kawasan Banten Lama	914,000,000.00	0.00	2,446,000.00	2,446,000.00	
14	Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan	11,832,670,000.00	2,130,000.00	259,600,000.00	261,730,000.00	Efisiensi belanja makanan dan minuman kegiatan dan sisa kontrak
	1 Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan	509,278,000.00	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	2	Pembangunan Perdesaan/ kelurahan Terpadu Berbasis Kantong- Kantong Kemiskinan Desa Tanjungan Kec. Cikeusik, Desa Teluk kec. Labuan Kab. Pandeglang	4,541,812,000.00	0.00	79,600,000.00	79,600,000.00	
	3	Pembangunan Perdesaan/ kelurahan Terpadu Berbasis Kantong- Kantong Kemiskinan Desa Margaluyu Kec. Sajira, Dea Cimarga Kec. Cimarga, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga, Desa SangiangJaya Kec. Cimarga, Desa Sudamanik Kec. Cimarga Kab. Lebak	2,271,028,000.00	0.00	44,300,000.00	44,300,000.00	
	4	Pembangunan Perdesaan/ kelurahan Terpadu Berbasis Kantong- Kantong Kemiskinan Kelurahan Margaluyu Kec. Kasemen , Kel. Warung jaud Kec. Kasemen Kota Serang	1,396,516,000.00	0.00	21,300,000.00	21,300,000.00	
	5	Peningkatan Kualitas Prasarana Lingkungan Kawasan Banten Lama	3,114,036,000.00	0.00	114,400,000.00	114,400,000.00	
15	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten		7,644,859,375.00	233,890,196.00	61,436,675.00	295,326,871.00	Efisiensi belanja listrik, pengadaan dan sisa kontrak
	1	Perawatan Lift Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	203,913,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
	2	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	2,785,000.00	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00	
	3	Pemeliharaan Kebersihan KP3B	1,623,232,400.00	708,000.00	40,232,500.00	40,940,500.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
4	Perawatan Dinding ACP dan Kaca Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	203,913,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	
5	Perawatan Utilitas Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	203,913,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	
6	Updating Master Plan KP3B	51,600,000.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	
7	Rekening Listrik KP3B (Alun-alun KP3B, Landscape Monumen KP3B, Monumen Kayu Fosil KP3B, SKPD Terpadu)	1,684,000,000.00	231,503,196.00	0.00	231,503,196.00	
8	Perawatan Elektrikal Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	203,913,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	
9	Pemeliharaan Atap dan Kubah Masjid Raya Al-Bantani	187,468,975.00	9,000.00	455,975.00	464,975.00	
10	Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Laki- laki (Depan) Masjid Raya Al-Bantani	203,913,000.00	9,000.00	500,000.00	509,000.00	
11	Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Laki- laki (Belakang) Masjid Raya Al-Bantani	203,913,000.00	9,000.00	500,000.00	509,000.00	
12	Pemeliharaan Tempat Wudhu dan Toilet Perempuan Masjid Raya Al-Bantani	203,913,000.00	9,000.00	500,000.00	509,000.00	
13	Pemeliharaan Atap Kanopi (Depan) Masjid Raya Al Bantani	138,913,000.00	9,000.00	1,100,000.00	1,109,000.00	
14	Pemeliharaan Atap Kanopi (Belakang) Masjid Raya Al Bantani	138,913,000.00	9,000.00	1,100,000.00	1,109,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
15	Perbaikan Pagar depan dan Pengecatan Gapura KP3B	203,913,000.00	9,000.00	600,000.00	609,000.00	
16	Perbaikan dan Pengecatan Pos Pengamanan dan Halte di Kp3B	103,913,000.00	9,000.00	700,000.00	709,000.00	
17	Perbaikan (Patching) Jalan di Kp3B	203,913,000.00	9,000.00	900,000.00	909,000.00	
18	Pemeliharaan AC (4 bulan) SKPD Terpadu	203,913,000.00	9,000.00	600,000.00	609,000.00	
19	Pemeliharaan Trotoar Jalan di KP3B	203,913,000.00	9,000.00	1,000,000.00	1,009,000.00	
20	Pemeliharaan Tempat Sampah di KP3B	203,913,000.00	9,000.00	700,000.00	709,000.00	
21	Pembuatan marka Jalan Untuk Parkir di Gedung SKPD Terpadu	103,913,000.00	9,000.00	1,100,000.00	1,109,000.00	
22	Pemeliharaan Instalasi dan Pemasangan Lampu Taman	153,913,000.00	9,000.00	600,000.00	609,000.00	
23	Pemeliharaan Pagar Samping dan Belakang KP3B	203,913,000.00	9,000.00	700,000.00	709,000.00	
24	Pemeliharaan Pancaniti dan Utilitas Penunjangnya	203,913,000.00	9,000.00	600,000.00	609,000.00	
25	Penataan dan Pemeliharaan Kolam Air Mancur	203,913,000.00	9,000.00	700,000.00	709,000.00	
26	Peningkatan Audio Sistem Masjid Raya Al-Bantani	201,600,000.00	9,000.00	3,187,000.00	3,196,000.00	
27	Penyusunan SOP Pengelolaan KP3B	53,913,000.00	9,000.00	301,200.00	310,200.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	28	Konsultan Pengawas Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten	142,000,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	
16		Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	13,608,341,180.00	886,524,358.00	0.00	886,524,358.00	1. Efisiensi belanja penggandaan, promosi dan publikasi, honorarium pokja
	1	Landscape Gedung Dinas SDA dan Permukiman Provinsi Banten	3,168,631,000.00	299,557,578.00	0.00	299,557,578.00	2. . Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terkait beberapa pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi untuk paket interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II), Pembangunan Plaza Aspirasi dan Landspace Gedung Dinas SDA an Permukiman Provinsi Banten (denda keterlambatan pekerjaan 10).



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	2 Interior Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten (Tahap II)	3,275,004,000.00	86,552,000.00	0.00	86,552,000.00	3 Penambahan Gedung Ruang Arsip yang tidak dilaksanakan karena bukan tidak sesuai tupoksi (Tupoksi UPT KP3B)
	3 Rehab Plaza Masjid	1,783,891,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
	4 Data Base Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	372,718,780.00	206,241,380.00	0.00	206,241,380.00	
	5 Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	9,285,000.00	8,385,000.00	0.00	8,385,000.00	
	6 Pengadaan dan Pemasangan Kabel Listrik NYFGbY Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten	203,133,000.00	788,000.00	0.00	788,000.00	
	7 Pembangunan Plaza Aspirasi (Tahap IV)	4,523,531,000.00	12,793,000.00	0.00	12,793,000.00	
	8 Penambahan Ruang Gudang Arsip	272,147,400.00	272,147,400.00	0.00	272,147,400.00	
17	Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	47,665,745,668.00	2,900,008,672.00	1,342,484,000.00	4,242,492,672.00	1. Efisiensi belanja penggandaan, promosi dan publikasi, honorarium pokja dan belanja listrik



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
1	Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten	5,024,931,000.00	297,645,292.00	665,940,000.00	963,585,292.00	2. . Efisiensi hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi untuk paket Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II), Pembangunan Gedung Kantor dan Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II) dan Landscape Gedung Padepokan Silat
2	Pengembangan Bumi Perkemahan Cikujang (Tahap II)	2,273,941,000.00	214,960,000.00	0.00	214,960,000.00	3. Putus kontrak untuk paket pekerjaan Landscape Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten dengan progres fisik 92,94 % karena ada pekerjaan belum selesai (pengecatan dan dincing ACP
3	Pembangunan Gedung Kantor dan Assesment Center Badiklat Prov. Banten (Tahap II)	5,874,631,000.00	97,254,000.00	0.00	97,254,000.00	
4	Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II)	26,147,941,000.00	710,589,552.00	0.00	710,589,552.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
						pos jaga) dan Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap II) dengan progres fisik 97,28 % karena ada pekerjaan yang belum selesai (pengecatan dan pemasangan dinding ACP pada drop off)
5	Landscape Gedung Padepokan Silat	6,582,299,388.00	1,086,080,388.00	641,122,000.00	1,727,202,388.00	4. Terdapat efisiensi / sisa anggaran untuk paket pengadaan alat(tidak boleh dilaksanakan sesuai arahan peneliti)
6	Bimbingan Teknis PP Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	176,690,000.00	0.00	0.00	0.00	5, Sisa Kontrak
7	Data Base Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Di Luar KP3B	372,834,280.00	205,234,880.00	0.00	205,234,880.00	
8	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	9,278,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	
9	Pembayaran Listrik Gedung Kantr Tahun 2016 di Luar KP3B	300,000,000.00	280,807,560.00	0.00	280,807,560.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	10	Penyusunan Pergub Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Teknis dalam rangka Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Lingkup OPD Provinsi Banten dan Instansi Vertikal	52,468,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	
	11	Penyusunan Rancangan Pedoman Teknis Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	52,468,000.00	507,000.00	0.00	507,000.00	
	12	Interior Ruang Kerja KEJATI Provinsi Banten	798,264,000.00	0.00	35,422,000.00	35,422,000.00	
18	Perencanaan DED Gedung Kantor dan Infrastruktur Keciaptakyaan lainnya		3,664,419,400.00	547,719,400.00	12,455,000.00	560,174,400.00	1. Efisiensi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 7 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
	1	DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kec. Bayah Kabupaten Lebak	417,122,000.00	59,500,000.00	0.00	59,500,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
2	DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kec. Maja Kab. Lebak	415,575,000.00	109,470,000.00	0.00	109,470,000.00	2, Forum Konsultansi Publik Review Masterplan Pembangunan TPST Bojong Menteng yang tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
3	DED Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kec. Cibaliung Kabupaten Pandeglang	414,096,000.00	86,250,000.00	0.00	86,250,000.00	3, Efisiensi/ sisa kontrak
4	SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kwsn. Strategis ekonomi Kec. Bojonegoro di Kab. Serang	400,494,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	
5	SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kecamatan Kasemen Kota Serang	408,600,000.00	37,750,000.00	0.00	37,750,000.00	
6	SID Infrastruktur Perumahan dan Permukiman/ KeCipta Karya di Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang	408,075,000.00	65,400,000.00	0.00	65,400,000.00	
7	Perencanaan Penyediaan Air Bersih dan Perluasan Area Seren Taun pada Kawasan Kaolotan	392,070,000.00	51,350,000.00	0.00	51,350,000.00	
8	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan	895,000.00	0.00	0.00	0.00	
9	Kompilasi Data Perencanaan Bangunan Gedung	16,317,400.00	0.00	0.00	0.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	10	Review Masterplan Pembangunan TPST Bojong Menteng	288,636,000.00	111,999,400.00	1,130,000.00	113,129,400.00	
	11	Studi Kelayakan Lokasi Rumah Jabatan Pimpinan Daerah	51,875,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
	12	Studi Kebutuhan Anggaran Penataan Banten Lama	103,375,000.00	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	
	13	Kajian Penetapan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	103,375,000.00	0.00	4,525,000.00	4,525,000.00	
	14	Kompilasi Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Permukiman	88,289,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
	15	DED GOR Mini Kawasan KP3B	51,875,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
	16	DED Gedung PKK Provinsi Banten	51,875,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	
	17	Review DED Pujasera KP3B	51,875,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
19	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman		3,672,291,500.00	350,258,000.00	269,675,900.00	619,933,900.00	1, Efisiensi belanja pendukung untuk Rapat Koordinasi Kegiatan DED Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di 8 Kabupaten/Kota
	1	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Tangerang Selatan	289,353,000.00	65,600,000.00	0.00	65,600,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
2	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Tangerang	294,658,000.00	35,500,000.00	0.00	35,500,000.00	2. Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 6 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
3	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Lebak	296,144,000.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	3, Efisiensi / Sisa kontrak
4	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Pandeglang	294,606,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
5	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Serang	295,423,000.00	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	
6	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kabupaten Tangerang	296,332,500.00	42,200,500.00	0.00	42,200,500.00	
7	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Serang	304,525,000.00	0.00	28,143,200.00	28,143,200.00	
8	DED Infrastruktur Dasar kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Kota Cilegon	304,525,000.00	0.00	31,414,700.00	31,414,700.00	
9	Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di WKP I (Kabupaten Tangeang, Kota Tangerang, Kota Tangsel)	52,025,000.00	0.00	1,061,000.00	1,061,000.00	
10	Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di WKP II (Kabupaten Kota Serang dan Kota Cilegon)	52,025,000.00	0.00	1,211,000.00	1,211,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
11	Updating Data Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di WKP II (KabupatenPandeglang dan Lebak)	52,025,000.00	0.00	1,136,000.00	1,136,000.00	
12	Rapat Koordinasi Kegiatan DED Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di 8 Kabupaten/Kota	320,900,000.00	138,557,500.00	0.00	138,557,500.00	
13	Konsultan Pendamping Pekerjaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman	819,750,000.00	0.00	206,710,000.00	206,710,000.00	
20	Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	1,195,085,500.00	205,000,000.00	0.00	205,000,000.00	1. Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 2 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
1	Jakstra dan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah dan Sanitasi Provinsi Banten	592,747,000.00	105,700,000.00	0.00	105,700,000.00	
2	Jakstra dan Rencana Induk Pengembangan Perumahan dan Penataan Bangunan Gedung Provinsi Banten	601,826,000.00	99,300,000.00	0.00	99,300,000.00	
3	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan dan Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	512,500.00	0.00	0.00	0.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
21	Penatagunaan Kawasan Permukiman		1,177,148,000.00	171,758,000.00	200,000.00	171,958,000.00	1, Efisiensi honorarium panitia pelaksanaan kegiatan, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, pengadaan
	1	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah provinsi Bidang Kawasan Permukiman Kumuh dan Bencana 8 kab/kota	150,000,000.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	2. Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 2 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
	2	Penyusunan Pedoman Teknis Penanganan Kawasan kumuh dan Bencana	464,273,000.00	76,933,000.00	0.00	76,933,000.00	
	3	Penyusunan SOP Penanganan Kawasan Kumuh dan Bencana	512,875,000.00	91,455,000.00	0.00	91,455,000.00	
	4	Pedoman Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh	50,000,000.00	1,750,000.00	200,000.00	1,950,000.00	
22	Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman		2,231,250,000.00	0.00	230,094,000.00	230,094,000.00	
	1	Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	303,396,000.00	0.00	110,171,000.00	110,171,000.00	1, Efisiensi kontrak
	2	Pengawasan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	289,461,000.00	0.00	79,763,000.00	79,763,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	3 Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor di KP3B	346,532,000.00	0.00	0.00	0.00	
	4 Pengawasan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	1,215,611,000.00	0.00	40,160,000.00	40,160,000.00	
	5 Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
	6 Rapat Koordinasi Evaluasi Pekerjaan Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman	75,450,000.00	0.00	0.00	0.00	
23	Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan(Pembayaran Kewajiban TA. 2016)	4,512,466,260.00	622,588,240.00	0.00	622,588,240.00	
	1 Pembangunan Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, PUSDALOPS DAN Kelengkapan Operasional Lainnya (Tahap II)	2,333,227,770.00	88,719,912.00	0.00	88,719,912.00	
	2 Pembangunan Gedung Asrama BLKI (Tahap I)	2,179,238,490.00	533,868,328.00	0.00	533,868,328.00	
24	Pembangunan Gedung Kantor KP3B (Pembayaran Kewajiban TA. 2016)	984,272,153.00	204,003,000.00	0.00	204,003,000.00	
	1 Penambahan Ruang Dinas SDA dan Pemukiman Provinsi Banten (Tahap III)	984,272,153.00	204,003,000.00	0.00	204,003,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
25	Pembinaan dan Penataan Perumahan		4,916,151,000.00	132,116,000.00	0.00	132,116,000.00	1, Efisiensi perlengkapan peserta, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, dokumentasi, promosi dan publikasi, pengadaan
	1	Evaluasi Pembangunan Rumah Tidak layak Huni	66,117,000.00	6,558,000.00	0.00	6,558,000.00	2, 2 unit RTLH dikota serang/ kasemen tidak dilaksanakan karena yang bersangkutan (penerima bantuan) tidak menyetujui pelaksanaan pekerjaan tersebut
	2	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang	455,769,000.00	99,925,000.00	0.00	99,925,000.00	
	3	Sosialisasi Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang	26,805,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	
	4	Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan (Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan Kegiatan dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun)	1,945,400.00	0.00	0.00	0.00	
	5	Koordinasi Stimulan Pembangunan Rumah	28,527,000.00	24,033,000.00	0.00	24,033,000.00	
	6	Sosialisasi Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak layak Huni	1,408,000.00	0.00	0.00	0.00	
	7	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak	4,335,579,600.00	0.00	0.00	0.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
26	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan		1,799,255,000.00	136,400,000.00	2,277,000.00	138,677,000.00	1, Efisiensi belanja jasa tenaga ahli
	1	Penyusunan Program Pengembangan Perumahan	609,945,000.00	24,600,000.00	0.00	24,600,000.00	2. Efisiensi hasil pemeriksaan BPK terhadap 3 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
	2	Pendataan Kajian Calon Hunian	286,100,000.00	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	
	3	SID Pengembangan prototype type rumah hunian horizontal dan vertical	452,410,000.00	16,600,000.00	0.00	16,600,000.00	
	4	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
	5	Pengawasan Pembangunan RTLH TA. 2017	163,500,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	
	6	Pengawasan Pembangunan RTLH Pada Kawasan Startegis Banten Lama	36,500,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	
	7	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan RTLH	50,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
	8	Penyusunan Laporan Capaian SPM Bidang Perumahan	200,000,000.00	0.00	2,277,000.00	2,277,000.00	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
27	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan		950,000,000.00	68,111,400.00	15,014,000.00	83,125,400.00	1, Efisiensi belanja pengadaan, sewa ruang rapat, makanan dan minuman kegiatan, honorarium pejabat/ pokja pengadaan
	1	Penyelenggaraan PSU Permukiman	300,000,000.00	20,475,000.00	8,919,000.00	29,394,000.00	
	2	Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan	300,000,000.00	30,135,000.00	6,095,000.00	36,230,000.00	
	3	Koordinasi Penyediaan Pembangunan Perumahan	300,000,000.00	7,501,400.00	0.00	7,501,400.00	
	4	Pendataan dn Verifikasi Calon Penerima Penyelenggaraan Pembangunan RTLH tahun 2018	50,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
28	Penatagunaan Pengembangan Perumahan		2,700,000,000.00	275,143,000.00	44,055,000.00	319,198,000.00	1, Efisiensi belanja pengadaan, sewa ruang rapat/ tempat pertemuan, makanan dan minuman kegiatan, jasa narasumber
	1	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	803,080,000.00	19,815,000.00		19,815,000.00	2. Efisiensi hasil pemeriksaan BPK



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

No	Kegiatan/ Tolok Ukur	Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
			Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
2	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Bidang Perumahan 8 Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten	821,365,000.00	28,330,000.00		28,330,000.00	terhadap 3 paket pekerjaan terkait ketidaksesuaian jumlah pengalaman kerja tenaga ahli yang dituangkan dalam kontrak
3	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1,200,000.00	0.00		0.00	3, Terdapat 1 paket pekerjaan penyusunan naskah Akademis RAPERDA Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
4	Sinergitas Program Pengembangan dan pembangunan Perumahan	370,620,000.00	13,088,000.00	23,600,000.00	36,688,000.00	
5	Penyusunan naskah Akademis RAPERDA Pembiayaan Perumahan Untuk MBR	504,865,000.00	15,040,000.00	20,455,000.00	35,495,000.00	
6	Penyusunan naskah Akademis RAPERDA Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	198,870,000.00	198,870,000.00	0.00	198,870,000.00	



No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
29	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan		22,400,000,000.00	21,942,750,000.00	1,300,000.00	21,944,050,000.00	Pengadaan lahan yang tidak dilaksanakan karena terkendala waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi
	1	Pengembangan Lahan Pembangunan Perumahan	395,075,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	
	2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan dan Akhir Tahun Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Pengadaan Lahan	800,000.00	0.00	0.00	0.00	
	3	Pengadaan Lahan Banten Lama	22,004,125,000.00	21,942,750,000.00	0.00	21,942,750,000.00	
30	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		525,000,000.00	100,000.00	1,075,000.00	1,175,000.00	Sisa Kontrak
	1	Penyediaan Data Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,660,000.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Pemeliharaan Jaringan Komputer Dan Sistem Telematika Data Base Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	238,470,000.00	0.00	347,000.00	347,000.00	
	3	Update Buku Data dan Informasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017	116,750,000.00	0.00	728,000.00	728,000.00	

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN**

No	Kegiatan/ Tolok Ukur		Pagu Anggaran	Sisa Anggaran		Jumlah (Rp)	Keterangan
				Anggaran tidak Digunakan	Sisa Kontrak		
	4	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23,160,000.00	0.00	0.00	0.00	
	5	Publikasi Informasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45,960,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
		JUMLAH	274,905,604,638.00	109,546,962,448.00	3,498,654,652.00	113,045,617,100.00	

BAB IV

PENUTUP

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah memiliki makna sebagai wujud nyata bentuk pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Pemukiman. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Di masa mendatang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Upaya yang terus ditingkatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan pendayagunaan aparatur negara.

Pada Tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menetapkan enam rencana strategis yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Kinerja. Keenam rencana strategis tersebut meliputi :

1. Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman
2. Program Pembinaan dan Penataan Perumahan
3. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
4. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
5. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

Ketercapaian kinerja rencana strategis tersebut di atas dapat dilihat dari keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian beberapa indikator kinerja yang akan dicapainya. Pengukuran kinerja per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100%	100%	100%
		Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%	100%
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur	100%	22.55%	22.55%
		Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100%	100%	100.00%
		Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian	100%	77.41%	77.41%
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah	100%	100%	100.00%

No	Program / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (M3)	1.983,75 m3	734,4 m3	37,02 %
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/ kel (lokasi)	113	71	62,83 %
		Penyelesaian Gedung KP3B	1	1	100 %
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3	3	100 %
4	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan	20%	6.40%	32%
5	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	1 Paket	1	100 %

Kiranya LAKIP Pemerintah Provinsi Banten Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sendiri, Bahan LAKIP Provinsi Banten bidang perumahan, pemukiman dan Cipta Karya) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.